



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu-isu Strategis .....	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
1.5 Tindak lanjut atsa Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	15
1.6 Langkah Perbaikan Internal.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	19
2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2025.....	26
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	52
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	59
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	79
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	79
3.2 Realisasi Anggaran.....	134
3.3 Inovasi.....	137
3.4 Penghargaan.....	146
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	152
4.1 Kesimpulan	152
4.2 Rekomendasi.....	153
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Setda Prov. Jateng Tahun 2025.....	5
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Penunjang Setda Prov. Jateng Tahun 2025.....	7
Tabel 1.3	Dukungan Anggaran.....	9
Tabel 1.4	Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas SAKIP Setda Th.2025.....	16
Tabel 1.5	Langkah Perbaikan Internal Setda Tahun 2025.....	17
Tabel 2.1	Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026.....	21
Tabel 2.2	Target Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Tahun 2025.....	25
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 2025.....	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 .....	53
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun .....	79
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 .....	82
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023-2025.....	85
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun Akhir 2026.....	92
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	95
Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	101
Tabel 3.7	Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	105
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	E- Planning.....	60
Gambar	2.2	E- Budgeting.....	60
Gambar	2.3	E-RKO.....	60
Gambar	2.4	E-Penatausahaan.....	61
Gambar	2.5	E-Controlling APBD dan Kinerja.....	61
Gambar	2.6	e-SIPD.....	62
Gambar	2.7	Tampilan Dashboard Pak Bejo.....	63
Gambar	2.8	Progres Bantuan Pak Bejo.....	63
Gambar	2.9	Dashboard SIMBANGDA.....	64
Gambar	2.10	SIVERO.....	64
Gambar	2.11	SKEMA JATENG.....	65
Gambar	2.12	SIBRO.....	66
Gambar	2.13	Website JDIH Biro Hukum .....	66
Gambar	2.14	Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum.....	66
Gambar	2.15	Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD .....)	67
Gambar	2.16	Aplikasi Waskito Jateng.....	67
Gambar	2.17	Aplikasi RANHAM Prov. Jateng.....	67
Gambar	2.18	Aplikasi SILALAP BAJA.....	68
Gambar	2.19	Aplikasi SIRUP Lokal.....	69
Gambar	2.20	SPSE.....	69
Gambar	2.21	Blangkon Jateng.....	70
Gambar	2.22	SIMONBAJA.....	70
Gambar	2.23	Aplikasi e-Layanan Biro Umum.....	71
Gambar	2.24	Aplikasi SIMPEL.....	71
Gambar	2.25	PPID Setda.....	72
Gambar	2.26	Aplikasi e-Office.....	73
Gambar	2.27	Sistem Peminjaman Arsip (SIPENA).....	74
Gambar	2.28	Sistem Administrasi Pemenuhan Barang SAPUBARBAR	75
Gambar	2.29	Sistem Informasi Pemantauan Pencairan.....	75
Gambar	2.30	Silap Online Desa.....	76

Gambar	2.31	Silap Online CSR.....	77
Gambar	2.32	Aplikasi DARI RANTAU.....	77
Gambar	2.33	Aplikasi SIPETE.....	78
Gambar	3.1	JDIH.....	138
Gambar	3.2	Aplikasi SIMANIS MART.....	140
Gambar	3.3	SIMONBAJA.....	142
Gambar	3.4	Aplikasi SIBRO.....	143
Gambar	3.5	Penghargaan Juara I Kategori Provinsi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH ) tahun 2025.....	146
Gambar	3.6	TPID Award Provinsi dengan kinerja TPID terbaik.....	148
Gambar	3.7	Anugrah Adinata Syariah.....	148
Gambar	3.8	Finalis Top Inovasi Kipp Tahun 2025 Kelompok Mum.....	149
Gambar	3.9	Pengaugerahan ITKP 2025 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya.....	150
Gambar	3.10	Pengaugerahan ITKP 2025 Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa.....	151

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan informasi yang jelas sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang telah ditetapkan dan dengan berorientasi pada hasil dan dampaknya.

Semarang, 26 Februari 2026  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Daerah**

**Eni Lestari, ST., MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 197212011998032011

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah kepada Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat atas penggunaan sumber daya publik yang telah dialokasikan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 menuju pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Pembahasan perubahan struktur organisasi dan tata kerja baru dilakukan tahun 2025 agar selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, LKjIP Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program pada tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan program RPJMD periode 2025-2029.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan program lintas perangkat daerah, Sekretariat Daerah memegang peran sentral dalam menjamin keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKjIP Setda Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi, efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung tercapainya sasaran strategis daerah.

Guna mewujudkan pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang mendukung pencapaian tujuan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah”. Tujuan pertama memiliki satu sasaran yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil. Sedangkan tujuan kedua, memiliki dua sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan (2) Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Laporan kinerja disusun sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penyajian pelaporan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Tingkat capaian tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan peningkatan pencapaian kinerja.

## 1.2 Isu-Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, terdapat 6 (enam) isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Peningkatan kualitas kebijakan daerah, dengan agenda startegis:
  - a. Bantuan hukum kepada kelompok miskin dan rentan dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
  - b. Sinkronisasi program pengendalian inflasi antar OPD belum saling berkesinambungan dari sisi hulu sampai ke hilir sehingga upaya pengendalian inflasi belum berjalan secara optimal.
  - c. Sinkronisasi upaya pengendalian inflasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d. Koordinasi pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya diversifikasi pangan.
  - e. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah serta pengentasan kemiskinan
  - f. Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah.
  - g. Konsolidasi Jateng 1 (satu) harga disebabkan perbedaan harga pengadaan barang/jasa pada produk yang sama.
  - h. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang jasa SKPD Pemprov Jateng.
2. Penataan Birokrasi Biro Lingkup Sekretariat Daerah, dengan agenda startegis:
  - a. Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
  - b. Pembinaan dan penataan kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota.

- c. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum antara lain pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan Sekeretaryat Daerah serta publikasi dan protokoler Pimpinan.
3. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah, dengan agenda startegis:
  - a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, dengan agenda startegis:
  - a. Peningkatan pencapaian urusan bidang Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar,
  - b. Koordinasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) masih belum optimal.
  - c. Peningkatan kinerja urusan energi dan sumber daya alam dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  - d. Pengendalian kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional, dengan agenda startegis pengembangan sister province dalam rangka memperkuat kerjasama terkait antara lain sektor Pendidikan dan pertanian, serta program kembar yang nantinya dapat di implementasikan di kedua belah pihak.
6. Sinkronisasi Agenda Pembangunan, dengan agenda startegis:
  - a. Penyusunan regulasi yang selaras dan mendukung prioritas agenda pembangunan daerah.
  - b. Optimalisasi kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha dan Swasta.
  - c. Pemenuhan sarana prasarana keagamaan dan pelayanan kelembagaan keagamaan yang berkuantitas dan kualitas di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, isu strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 berfokus pada upaya menjadikan Sekretariat Daerah sebagai pusat kendali pemerintahan daerah yang mampu mengoordinasikan kebijakan secara efektif, menjamin akuntabilitas kinerja, serta mendorong birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

### 1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

#### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 505 Pegawai Negeri Sipil (data PNS per Desember 2025). Berdasar Jabatan/Eselon terdiri dari Eselon I sebanyak 1 orang, Struktural sebanyak 26 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 187 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 312 orang. Berdasarkan golongan, maka PNS Sekretariat Daerah terdiri dari golongan I dan P3K sebanyak 53 orang, golongan II sebanyak 51 orang, golongan III sebanyak 351 orang dan golongan IV sebanyak 78 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada per Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025**

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD+SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3K	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL+III	JFT	JFU
1	Sekretaris Daerah	1						1	0				1	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1					1		1			
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1						1					1		1			
4	Asisten Administrasi	1						1					1		1			
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	31	25	0	4	0	35	17	0	19	0	26	11	0	1	2	12	41
6	Biro Hukum	30	17	0	2	3	31	11	0	7	1	32	7	0	1	1	36	9
7	Biro Kesra	18	22	0	0	3	27	10	0	0	3	30	7	0	0	0	12	28
8	Biro Perekonomian	22	14	0	2	7	16	11	0	2	6	23	5	0	0	2	5	29

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD+SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3K	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL+III	JFT	JFU
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	16	0	2	1	19	13	0	6	1	20	8	0	1	1	12	21
10	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)	61	22	0	3	5	55	17	3	0	4	68	11	0	0	5	58	20
11	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	27	15	0	2	1	25	14	0	14	1	19	8	0	0	1	24	17
12	Biro Organisasi	26	22	0	2	4	24	18	0	3	2	33	10	0	1	1	16	30
13	Biro Umum	101	39	7	40	11	63	19	0	2	33	100	7	0	0	13	12	117
JUMLAH		339	192	7	57	35	295	134	3	53	51	351	78	1	7	26	187	312

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Penunjang**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025**

No.	Uraian		Jumlah
1	2		3
1	1.3.1.01	TANAH	16
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	40
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	315
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	19
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.815
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.787
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.936
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	25
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	45

No.	Uraian		Jumlah
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1
27	1.3.4.03	INSTALASI	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.747
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
			23.819

### c. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung 8 Program , 47 indikator Program dengan anggaran sebesar Rp. 689.371.560.000,- (Enam ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Sebagaimana tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

## Dukungan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
<b>BIRO HUKUM</b>		<b>3.235.169.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		424.518.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	424.518.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		2.810.651.000
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	1.250.599.000
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	229.541.000
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	788.346.000
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	542.165.000
<b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA</b>		<b>3.958.173.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		711.956.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	890.452.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		3.246.217.000
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	1.507.813.000
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	698.403.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	1.040.001.000
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>413.757.579.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		385.655.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	385.655.000
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		413.371.924.000
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	365.719.000
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	457.259.000
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	412.548.946.000
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>		<b>2.325.744.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		162.384.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	162.384.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.163.360.000
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	252.192.000
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	678.682.000
	Persentase nilai kemandirian BLUD	35.950.000
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	300.770.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	895.766.000
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>2.512.974.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		441.074.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	441.074.000
PROGRAM PEREKONOMIAND AN PEMBANGUNAN		2.071.900.000
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	312.748.000
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	330.555.000
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	1.428.597.000
<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		<b>1.896.434.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		135.353.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	135.353.000
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1.761.081.000
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	473.848.000
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	801.986.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	485.247.000
<b>BIRO ORGANISASI</b>		<b>2.491.355.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		554.386.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	554.386.000
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		1.936.969.000
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	52.333.000
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	107.348.000
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	132.740.000
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	161.405.000
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	121.551.000
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	144.412.000
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	1.047.483.000
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	169.697.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		<b>2.274.389.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		558.700.000
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	164.550.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	394.150.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.715.689.000
	Capaian Pelaksanaan APBD	358.078.000
	Capaian Pelaksanaan APBN	244.467.000
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	448.842.000
	Persentase realisasi bantuan keuangan	592.231.000
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	72.071.000
<b>BIRO UMUM</b>		<b>256.919.743.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		256.919.743.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	8.536.652.000
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	27.129.679.000

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	221.253.412.000
<b>TOTAL</b>		<b>689.371.560.000</b>

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Isu-isu Strategis
- 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025
- 1.6. Langkah Perbaikan Internal

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023-2025;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### 3.2 Realisasi Anggaran

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta efisiensi anggaran yang dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

### 3.3 Inovasi

Bab ini mencakup program/gagasan terkait pelayanan publik yang dilaksanakan Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2024.

### 3.4 Penghargaan

Bab ini membahas penghargaan level nasional sampai internasional yang diterima Biro lingkup Setda selama tahun 2024.

## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

### B. Rekomendasi

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

## 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Hasil Reviu (CHR) atas SAKIP Setda tahun 2025 dan hasil yang telah diperoleh sebagaimana tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Hasil Reviu (CHR)**  
**atas SAKIP Setda tahun 2024**

NO.	CATATAN HASIL REVIU (CHR) ATAS SAKIP SETDA 2025	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	HASIL
1.	Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki	1. Pemberian penghargaan Biro dengan kinerja terbaik tahun 2025 2. Pemberian penghargaan ASN terbaik Setda tahun 2025	1. SK Pemberian Reward Unit Setda 2025  2. SK ASN Terbaik 2025  <a href="https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025">https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025</a>
2.	Optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan keselarasan capaian kinerja pada dokumen perjanjian kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan aplikasi e-controlling kinerja	1. Pembuatan Surat Edaran Sekda perihal LKjIP, PK, IKI tahun 2026 2. Desk PK, IKI dan E-conkin tahun 2026	Biro Organisasi telah mengeluarkan edaran Sekda perihal LKjIP, PK, IKI tahun 2026 dan melaksanakan Desk PK, IKI dan E-conkin tahun 2026 ( IKI 2026 Semua Biro)  <a href="https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025">https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025</a>

### 1.6 Perbaikan Internal

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan Langkah perbaikan internal atas rekomendasi LKjIP Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagaimana tabel 1.5 berikut.

**Tabel 1.5**

**Langkah Perbaikan Internal Setda Tahun 2024**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Biro Organisasi untuk menyelesaikan pedoman/juknis terkait kriteria penilaian kinerja untuk pemberian reward dan punishment bagi unit kerja dan individu di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<p><b>1. Biro Adm. Bangda</b> akan menyusun pedoman/juknis terkait kriteria penilaian kinerja untuk pemberian reward dan punishment bagi unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>2. Biro Organisasi</b> akan menyusun pedoman/juknis terkait kriteria penilaian kinerja untuk pemberian reward dan punishment bagi individu di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b><a href="https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025">https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025</a></b></p>
2	Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya, serta Biro Administrasi Pembangunan Daerah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi E-Controlling sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah	<p><b>Biro Bangda</b> : Biro Adm. Bangda akan melaksanakan desk kinerja Biro lingkup Setda secara triwulanan</p> <p><b>Biro Perekonomian, Biro ISDA, Biro Kesra</b> : Melaksanakan Rakor Triwulanan dan MOnev capaian kinerja OPD Ampuan</p> <p><b><a href="https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025">https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025</a></b></p>
3	Biro-Biro meningkatkan pelaksanaan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan yang dapat mengungkit kinerja	<p><b>Biro Kesra</b> : Jateng Bersholawat</p> <p><b>Biro Isda</b> : Melaksanakan FGD Tematik</p> <p><b>Biro Perkonomian:</b> Rakor pengembangan promosi pariwisata</p> <p><b>Biro Bangda</b> : Laporan Rakor Evaluasi</p>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	<p>Pelaksanaan APBD dan Monev Bankeu Kab/Kota</p> <p><b>Biro Hukum</b> : Bintek Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah dengan peserta OPD Provinsi dan Kab/Kota, Bintek pengelolaann JDIH</p> <p><b>Biro Organisasi</b> : Penyusunan Perda dan Pergub SOTK</p> <p><b>Biro Otda</b> : Penandatanganan MOU</p> <p><b>Biro APBJ</b> : Pemutakhiran MCSP KPK</p> <p><a href="https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025">https://s.id/DataDukungLKjIPSetda2025</a></p>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut merupakan instrumen pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut menuntut sinergitas perencanaan strategis Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

#### 1. Visi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

**“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA,  
DAN LESTARI”**

#### 2. Misi

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
- e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan

- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah, mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator, fasilitator, dan pengendali kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah berfungsi sebagai penghubung utama antara Kepala Daerah dan seluruh perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengendalian kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Sekretariat Daerah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan secara terpadu, selaras, dan berorientasi pada hasil. Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan tiga sasaran untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan

indikator kinerja Tujuan dan Sasaran beserta targetnya tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 seperti tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target Indikator pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,1	37,1	38,1
Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil					
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	90
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	90	90
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	80	80
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah					
	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76	76,5	77
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target Indikator pada Tahun		
			2024	2025	2026
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	82,5	83
Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah					
	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2.85	2,87

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menetapkan target tujuan dan sasaran sebagaimana table 2.2

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah		Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah pada konteks peningkatan kualitas kebijakan, memiliki kekuatan berupa dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) yang selalu dievaluasi dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan namun memiliki kelemahan produk-produk kebijakan pembangunan yang belum senantiasa adaptif dan berorientasi hasil. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi pada peningkatan kebijakan yang cepat, *agile* dan berorientasi hasil. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya sinergi sektor-sektor pembangunan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkualitas.

Sekretariat Daerah pada konteks pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah, memiliki kekuatan berupa agenda untuk meningkatkan kualitas layanan melalui survei IKM secara periodik, dokumen manajemen risiko dan dokumen rencana kinerja tahunan. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu adanya arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kebijakan daerah yang berorientasi hasil dan adaptif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	Peningkatan Efektivitas Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional
			Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah
	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui Sinkronisasi Agenda Biro Biro Lingkup Sekretariat Daerah

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan Sekretariat Daerah disusun sebagai instrumen utama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan dirancang secara sistematis, terarah, dan terintegrasi agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 8 program, 31 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 689.371.560.000,- (Enam ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran

Program dan Kegiatan beserta dukungan anggaran dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 2025**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BIRO PEMERINTAH OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>					<b>3.958.173.000</b>
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					<b>3.246.217.000</b>
		Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.507.813.000
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	698.403.000
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.040.001.000
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				1.507.813.000
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	1.131.875.000
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	142.746.000
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	233.192.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				698.403.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	698.403.000
	Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.040.001.000
		Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	464.007.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	139.228.000
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	436.766.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					711.956.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan	%	100	711.956.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Asisten Pemerintahan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				711.956.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	711.956.000
<b>BIRO HUKUM</b>					<b>3.235.169.000</b>
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					<b>2.810.651.000</b>
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	97	1.250.599.000
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	97	229.541.000
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan	%	96	788.346.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perundang-undangan			
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	542.165.000
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.330.511.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	362.241.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	51.844.000
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	374.261.000
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	542.165.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum				1.480.140.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	1.250.599.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	229.541.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					424.518.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	424.518.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				326.480.000
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	326.480.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				98.038.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	98.038.000
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					<b>413.757.579.000</b>
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					<b>413.371.924.000</b>

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	83	365.719.000
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	84	457.259.000
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60	412.548.946.000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				365.719.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	104.180.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	110.994.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	150.545.000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				457.259.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	107.473.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	242.430.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	107.356.000
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				412.548.946.000
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	408.012.167.000
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	4.536.779.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					385.655.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	385.655.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				385.655.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	385.655.000
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA</b>					<b>2.512.974.000</b>
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					<b>2.071.900.000</b>
		Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	1.428.597.000
		Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	330.555.000
		Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	312.748.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				2.071.900.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	1.204.986.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	123.639.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	99.972.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	165.086.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	165.469.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	162.719.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	150.029.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					441.074.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	441.074.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				441.074.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	441.074.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>					<b>2.325.744.000</b>
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.163.360.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	300.770.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	895.766.000
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	678.682.000
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	252.192.000
		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	35.950.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				966.824.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	575.679.000
		Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	103.003.000
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	252.192.000
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	17.540.000
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	18.410.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				1.196.536.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	155.997.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	144.773.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	407.265.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	488.501.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					162.384.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	162.384.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				162.384.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	162.384.000
<b>BIRO ADM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					<b>1.896.434.000</b>
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					<b>1.761.081.000</b>
		Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	801.986.000
		Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	473.848.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	485.247.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				473.848.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	473.848.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				801.986.000
		Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	801.986.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				485.247.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	485.247.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					135.353.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	135.353.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.353.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	135.353.000
<b>BIRO ORGANISASI</b>					<b>2.491.355.000</b>
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					<b>1.936.969.000</b>
		Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48,57	52.333.000
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88,57	107.348.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	161.405.000
		Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70	1.047.483.000
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91,01	169.697.000
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69,05	132.740.000
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	121.551.000
		Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36,59	144.412.000
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				660.587.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	144.412.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	52.333.000
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	132.740.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	161.405.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	169.697.000
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1.276.382.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	1	1.047.483.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	107.348.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	121.551.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>554.386.000</b>

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DAERAH PROVINSI					
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	554.386.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				453.883.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	453.883.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.503.000
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	100.503.000
<b>BIRO ADM. BANGDA</b>					<b>2.274.389.000</b>
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					<b>1.715.689.000</b>
		Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,8	358.078.000
		Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5	244.467.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	592.231.000
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	86	448.842.000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	72.071.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1.194.776.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	229.182.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	128.896.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang	Dokumen	4	244.467.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bersumber dari APBN			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	134.779.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	307.616.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	149.836.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				520.913.000
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	92	312.089.000
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	136.753.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	72.071.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					558.700.000
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	164.550.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	394.150.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				164.550.000
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	164.550.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				394.150.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	394.150.000
<b>BIRO UMUM</b>					<b>256.919.743.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					256.919.743.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	221.253.412.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	8.536.652.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	27.129.679.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.555.202.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	13.278.125.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	63.952.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	213.125.000
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				23.827.484.000
		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	23.827.484.000
	Fasilitasi Keprotokolan				3.089.070.000
		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	3.089.070.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				99.862.359.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan	Laporan	12	99.862.359.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perangkat daerah yang disusun			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.089.757.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	1.089.757.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000.000
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.456.734.000
		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	37.456.734.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.546.699.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	28.524.999.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	21.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.851.144.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	14.851.144.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				26.880.385.000

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.170.385.000
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	710.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				7.741.000.000
		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	7.741.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>689.371.560.000</b>

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 seperti pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>				
1	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95
2	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95
4	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100
<b>BIRO HUKUM</b>				
1	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97
2	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	97
3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	96
4	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96
5	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
1	Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84
3	Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60
4	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>				
1	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84
2	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79
3	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86
4	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82
5	Meningkatkan capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56
6	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA</b>				
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang Infrastruktur dan SDA	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100
<b>BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				
1	Meningkatnya Persentase Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa	%	91
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82
3	Mengukur tingkat Efektivitas Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
1	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,8
		Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	86
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90
3	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Bangda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100
<b>BIRO ORGANISASI</b>				
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48,57
2	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88,57

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92
4	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70
5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91,01
6	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69,05
7	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90
8	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36,59
9	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100
<b>BIRO UMUM</b>				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100

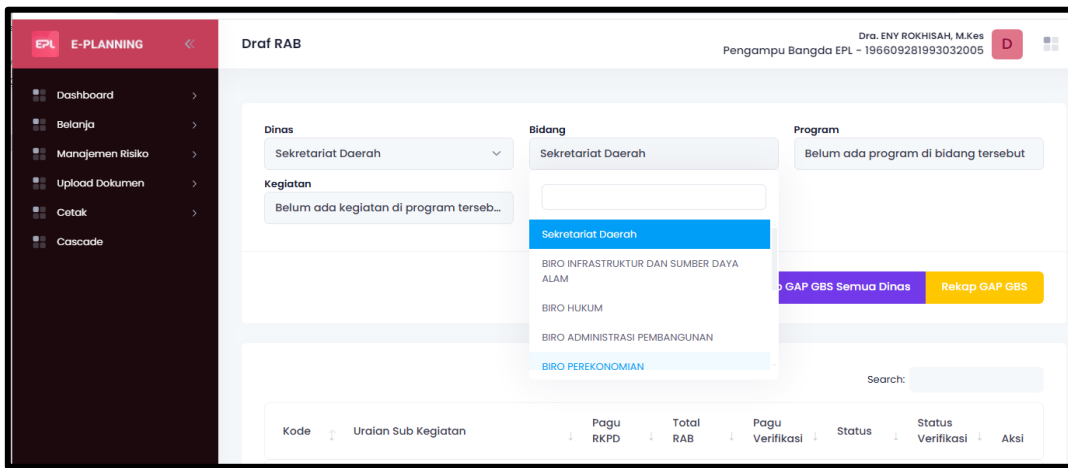
## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah didukung oleh aplikasi yang terintegrasi pada *e-Government* yang memuat beberapa aplikasi antara lain *e-budgeting*, *e-planning*, *e-RKO*, *e-penatausahaan*, *e-delivery* dan *e-controlling* yang mendukung seluruh proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Penerapan *e-Government* bertujuan untuk mempersingkat proses kerja birokrasi Pemerintah dan memungkinkan adanya transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

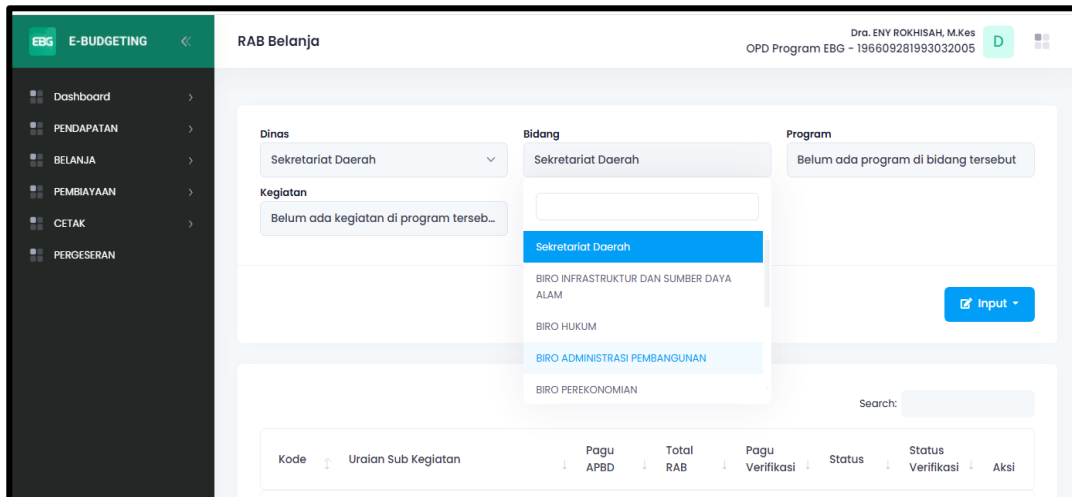
Dari Aplikasi tersebut Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebagai Penyusun Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengakses semua Biro Lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain *Single Om (SSO)* pada *e-Government*, beberapa Biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai aplikasi lain sebagai pendukung kinerja, diantaranya adalah:

### a. *E-Planning*

**Gambar 2.1**  
**E-Planning**

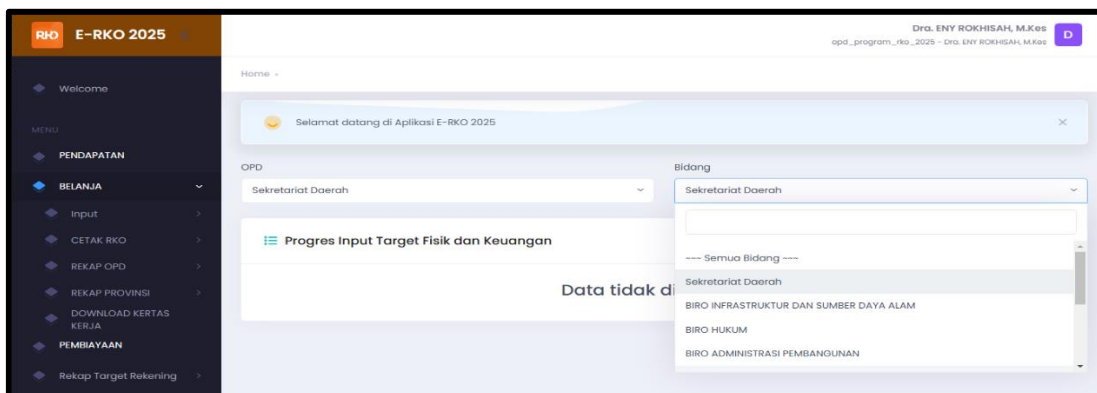


**Gambar 2.2**  
**E- Budgeting**



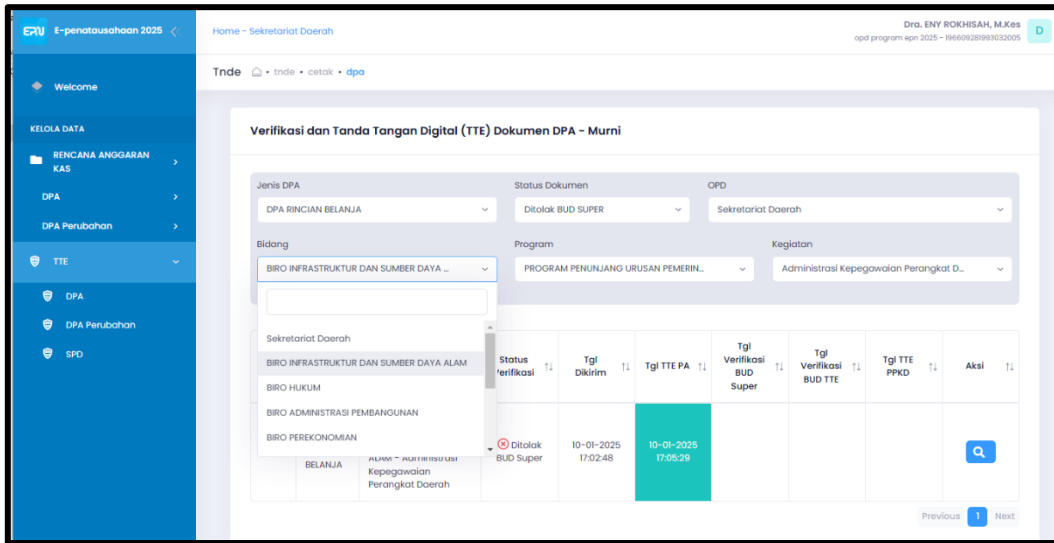
c. E-RKO

**Gambar 2.3**  
**E-RKO**



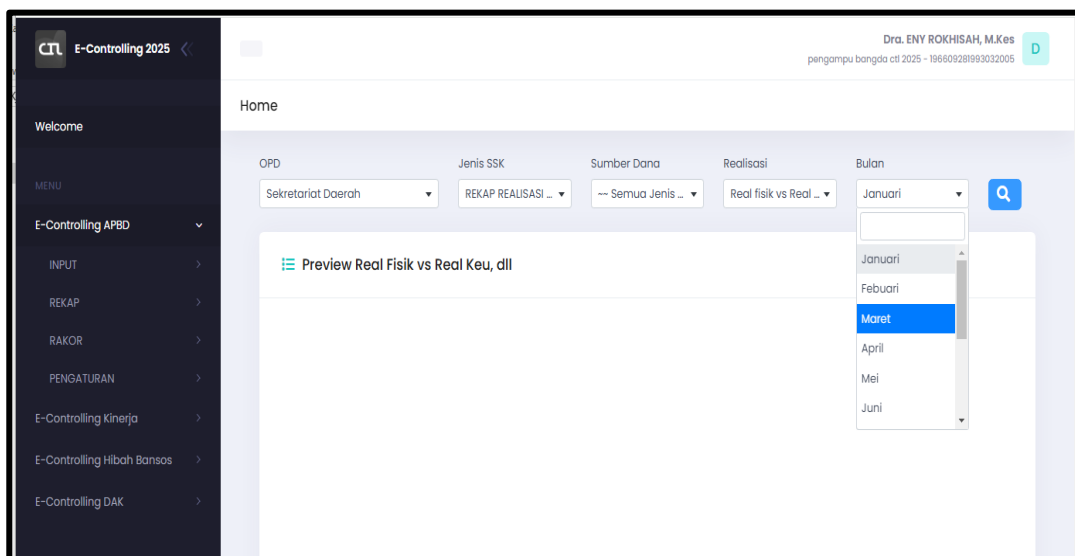
d. E-Penatausahaan

**Gambar 2.4**  
**E-Penatausahaan**



g. E-Controlling APBD & Kinerja

**Gambar 2.5**  
**E-Controlling APBD & Kinerja**



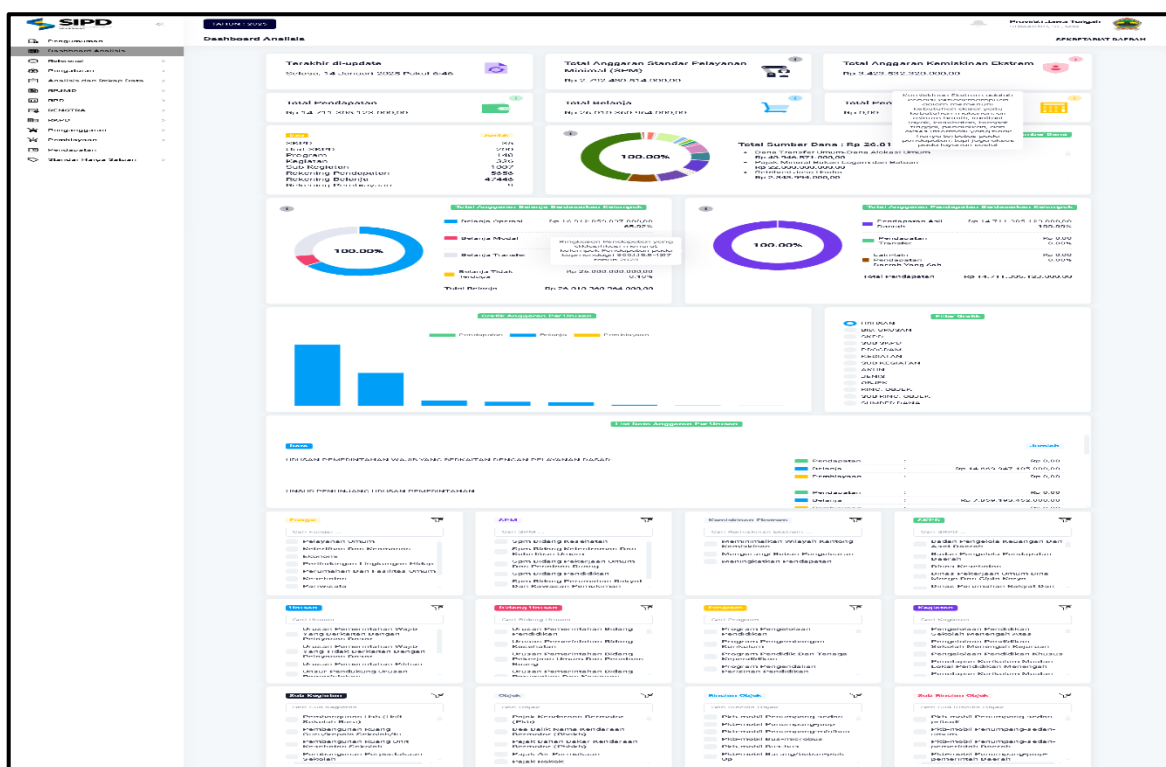
h. Aplikasi e-SIPD-RI

e-SIPD RI adalah platform digital yang dikembangkan untuk menyatukan semua data pemerintahan daerah dalam satu sistem terintegrasi. Fungsi utama sistem ini adalah memudahkan proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, sekaligus mendukung evaluasi kinerja secara nasional.

<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

**Gambar 2.6**

## e-SIPD-RI



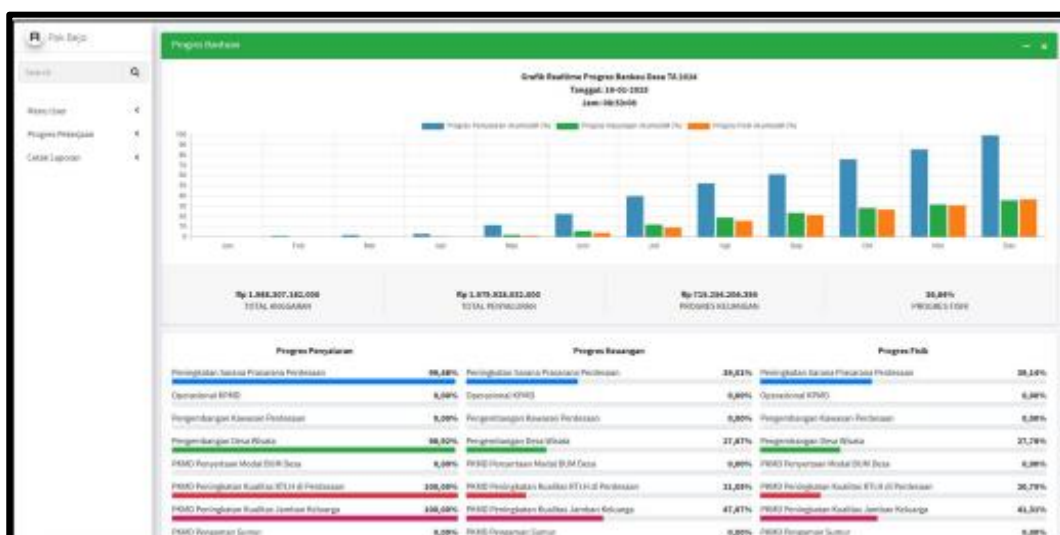
### 1. Biro Administrasi Pembangunan Daerah a. Aplikasi Pak Bejo

Sebagaimana tercantum dalam Pergub No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub No. 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bahwa Desa Penerima Bantuan setelah mencairkan dan melaksanakan kegiatan, membuat Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Aplikasi PAK BEJO bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam hal ini perangkat desa untuk melakukan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, mempermudah Admin Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan memformulasikan output Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ke dalam bentuk numerik sebagai bahan analisis pengolahan data.

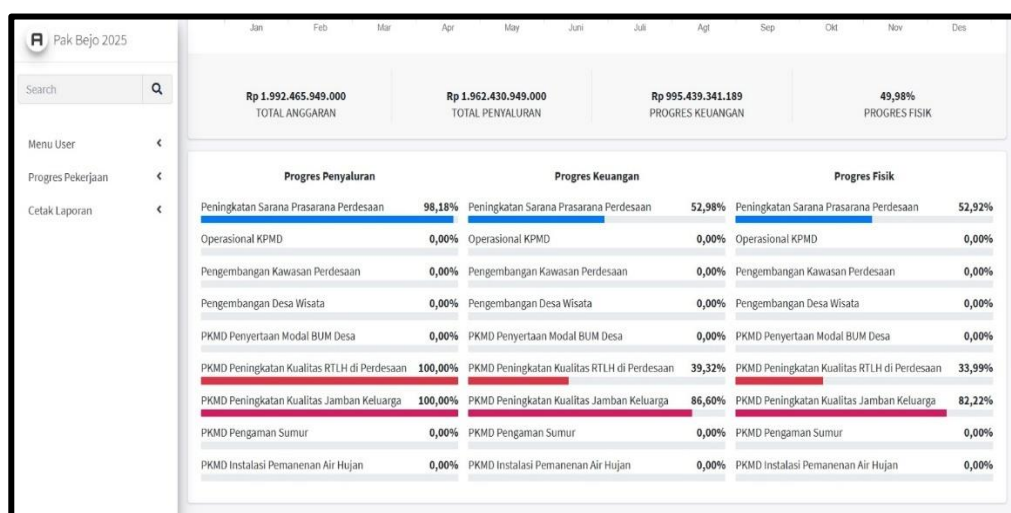
**Gambar 2.7**

## Tampilan Dashboard Pak Bejo



Gambar 2.8

## Progres Bantuan Pak Bejo



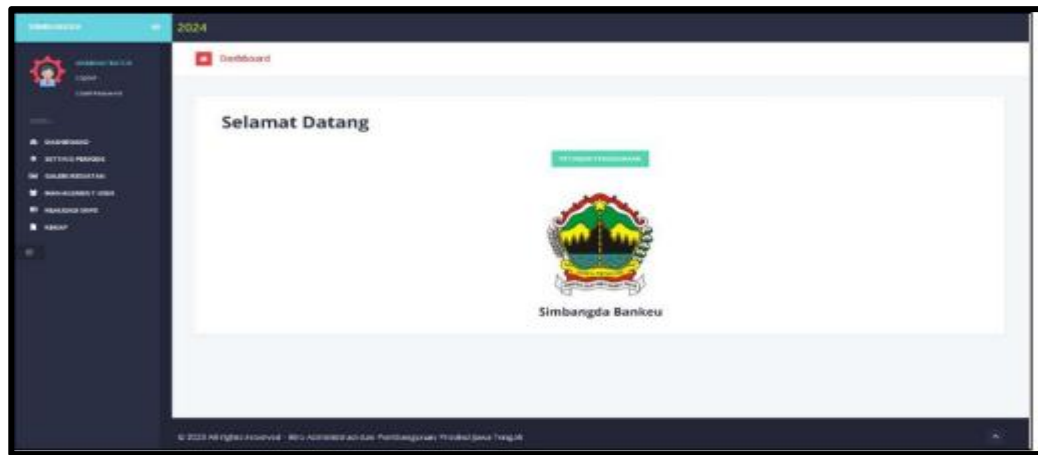
### b. SIMBANGDA (Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah)

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) yang merupakan platform berbasis online untuk pelaporan data kegiatan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Aplikasi SIMBANGDA menyajikan informasi terkait realisasi fisik dan keuangan anggaran bantuan keuangan secara *real time* sehingga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas. SIMBANGDA merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.9

## Dashboard SIMBANGDA



### c. SIVERO

Aplikasi Sistem Informasi Verifikasi RKO Online (SIVERO). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 9 ayat 5 yaitu proses verifikasi RKO dilakukan secara online melalui sistem informasi berbasis web maka dibangunlah aplikasi SIVERO.

Aplikasi SIVERO merupakan aplikasi yang mempermudah proses verifikasi RKO Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota karena seluruh proses verifikasi dilakukan secara online. User SKPD Kab/Kota menginput dan mengajukan data RKO melalui aplikasi SIVERO. Verifikator Bankeu Provinsi Jawa Tengah (Biro Bangda, BAPPEDA, BPKAD, DISDIKBUD, dan DISPERMADES) melakukan verifikasi RKO yang diajukan Kab/Kota melalui SIVERO, apabila dokumen lengkap dan sesuai maka akan mendapatkan persetujuan.

**Gambar 2.10**  
**SIVERO**

No.	Kabupaten/Kota	Mudah/Masih	Terdapat	Mudah	ACC	Batal	Belum Diproses
1	DIY	21.12.20					
2	DIY	21.12.20					
3	DIY	21.12.20					
4	DIY	21.12.20					
5	DIY	21.12.20					
6	DIY	21.12.20					
7	DIY	21.12.20					
8	DIY	21.12.20					

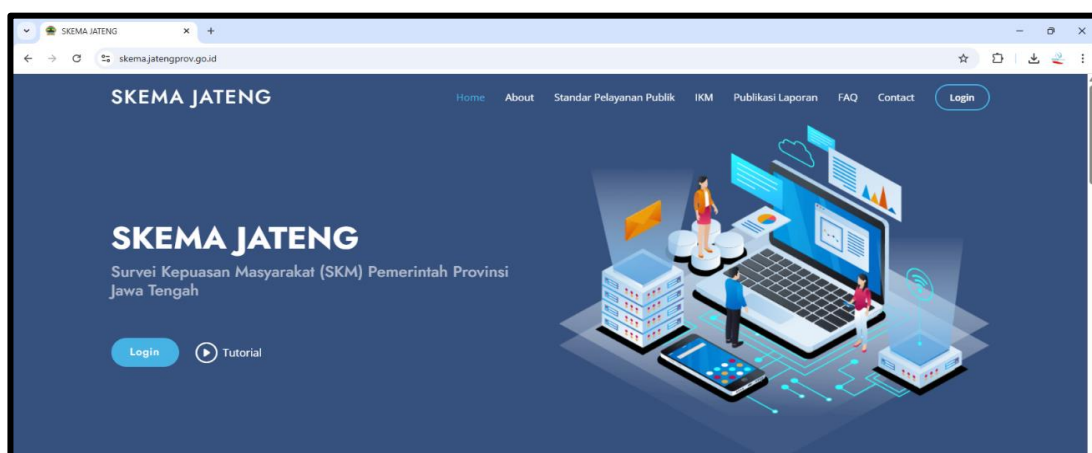
## 2. Biro Organisasi

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan kinerja pada Biro Organisasi, ada beberapa sistem informasi sebagai berikut:

a. Survei Kepuasan Masyarakat di Pemprov Jateng 2019-2025

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara daring melalui sistem ESKM JATENG ([eskm.jatengprov.go.id](http://eskm.jatengprov.go.id)) sejak tahun 2019 dan sistem ini juga menyediakan fasilitas unggah Standar Pelayanan (SP). Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2025 sistem ditingkatkan menjadi SKEMA JATENG ([skema.jatengprov.go.id](http://skema.jatengprov.go.id)) dengan beberapa penambahan fitur berupa template laporan yang tersedia langsung di akun masing-masing Organisasi Pelayanan Publik (OPP), QR Code yang langsung dihasilkan dan dapat digunakan dalam rangka penyebaran kuesioner, keamanan log in menggunakan OTP

**Gambar 2.11**  
**SKEMA JATENG**



b. SIBRO (Sistem Kerorganisasian Terpadu)

SIBRO merupakan pengembangan dari sistem informasi METAL (Monitoring dan Evaluasi Tatalaksana). SIBRO digunakan sebagai database organisasi untuk mempermudah pencarian data di Biro Organisasi, sarana fasilitasi dan monev Biro Organisasi ke OPD dan Pemkab/kota.

**Gambar 2.12**

## SIBRO



### 3. Biro Hukum

Gambar 2.13

Website JDIH Biro Hukum



Gambar 2.14

Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum



Gambar 2.15

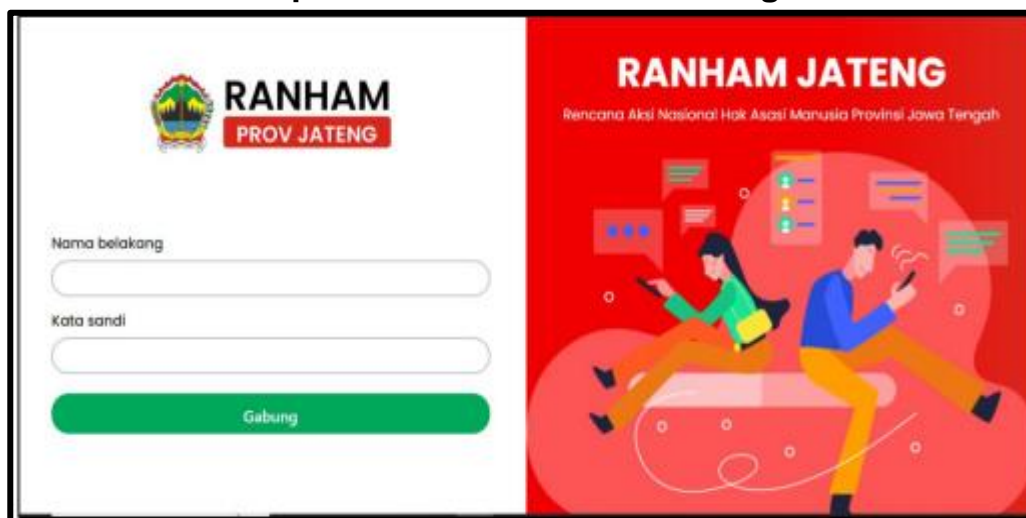
## Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)



**Gambar 2.16**  
**Aplikasi Waskito Jateng**



**Gambar 2.17**  
**Aplikasi RANHAM Prov. Jateng**



## 4. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

#### a. SILALAP BAJA

Fungsi:

- 1) Modernisasi proses layanan administrasi pengadaan barang/jasa.
- 2) Proses review dokumen tender SKPD.
- 3) Pendaftaran akun SPSE penyedia baru

**Gambar 2.18**

#### **Aplikasi SILALAP BAJA**



[\(https://silalapbaja.biroabpj.jatengprov.go.id/\)](https://silalapbaja.biroabpj.jatengprov.go.id/)

#### b. SIRUP Lokal

Fungsi:

- 1) Mengakomodasi proses pemaketan pengadaan barang/jasa ke dalam SiRUP LKPP.
- 2) Wujud transparansi perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Memastikan metode pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Gambar 2.19**

## Aplikasi SIRUP Lokal



(<https://sirup.biroapbj.jatengprov.go.id/>)

### c. SPSE

Fungsi:

- 1) Wujud Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, baik yang dilakukan menggunakan Metode Tender dan Non-Tender.
- 3) Pencatatan Pengadaan Non-Tender dan Swakelola.

**Gambar 2.20**

### SPSE



(<https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4>)

### d. Blangkon Jateng

Fungsi:

- 1) Mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

- 2) Report progres transaksi Pemerintah Daerah, data penyedia dan data produk.

**Gambar 2.21**  
**Blangkon Jateng**

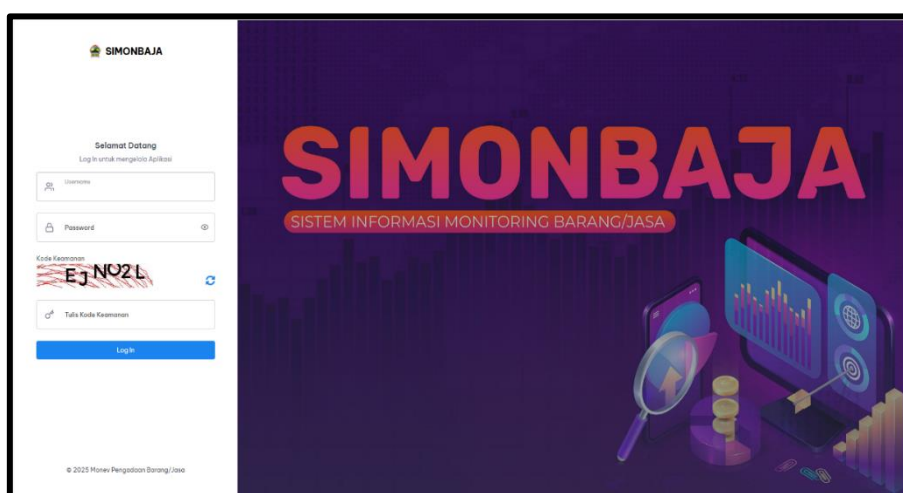


e. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA)

Fungsi:

- 1) Monitoring target dan realisasi proses pengadaan barang/jasa.
- 2) Mengintegrasikan data perencanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), data pemilihan penyedia barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta data e-Purchasing dengan aplikasi E-Katalog dan Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng).
- 3) Menampilkan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan alokasi paket pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diperoleh dari hasil input ekontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

**Gambar 2.22**  
**SIMONBAJA**



<https://simonbaja.jatengprov.go.id>

5. Biro Umum

e-Layanan Aplikasi untuk peminjaman Gedung, Ruang Rapat, venue kepada masyarakat / SKPD yang dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.23**

**Aplikasi e-Layanan Biro Umum**



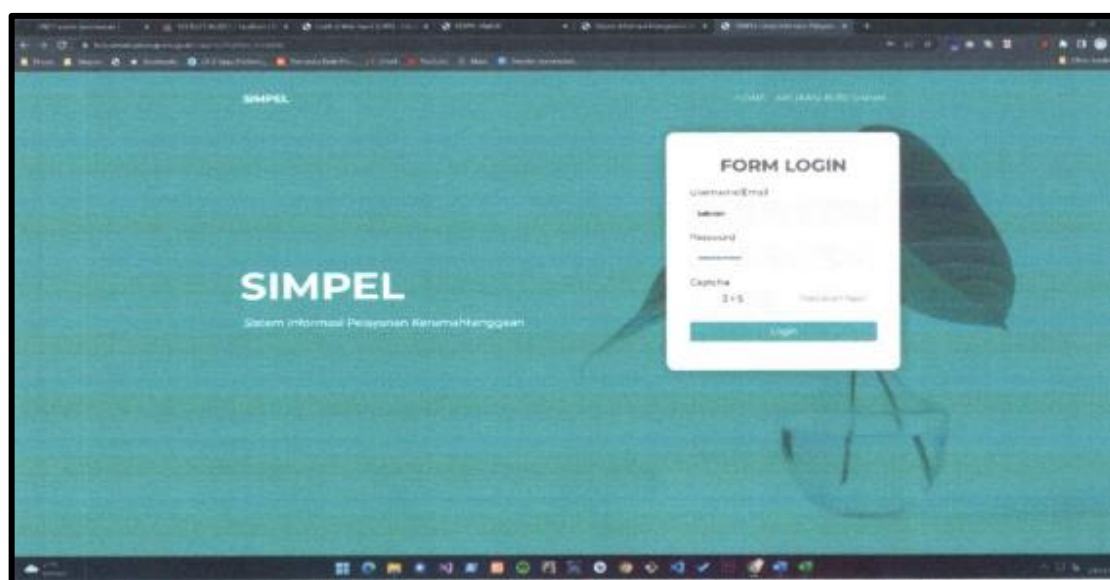
<https://biroumum.jatengprov.go.id/layanan/>

a. SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Kerumahtanggaan)

SIMPEL adalah sistem informasi yang berfungsi untuk mengkomidir pelaporan kerusakan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 2.24**

**Aplikasi SIMPEL**



<https://biroumum.jatengprov.go.id/sarpras>

b. PPID Setda Jateng

Fungsi dari PPID Setda Jateng adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi Publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

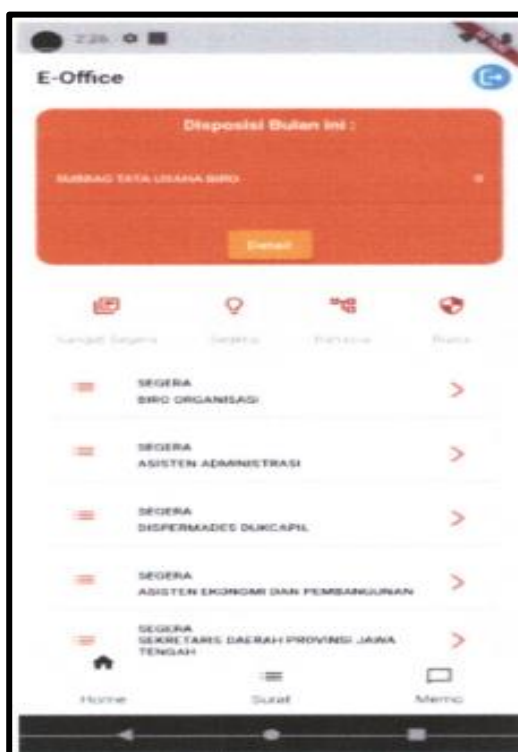
**Gambar 2.25**  
**PPID Setda Jateng**



c. e - OFFICE

Aplikasi e-Office adalah aplikasi persuratan yang digunakan di lingkungan Biro Umum dimana aplikasi ini digunakan untuk manajemen surat masuk dan surat keluar, serta untuk melakukan manajemen disposisi dari pimpinan, untuk melakukan disposisi langsung melalui android, dan disposisi akan langsung terdistribusikan mulai dari eselon 3, eselon 4 sampai dengan staf. Dimana pegawai yang mendapatkan disposisi akan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp dengan mendownload dari playstore.

**Gambar 2.26**  
**Aplikasi e-Office**



d. Aplikasi SIPENA (Sistem Informasi Peminjaman Arsip)

SIPENA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses peminjaman arsip secara terintegrasi dan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan, persetujuan, hingga pengembalian arsip dapat dilakukan secara online dan terdokumentasi dengan baik.

Implementasi SIPENA memberikan manfaat antara lain:

- Mempercepat proses peminjaman arsip tanpa harus melalui proses manual.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.
- Menyediakan rekam jejak peminjaman arsip yang dapat dipantau secara real time.
- Mengurangi risiko kehilangan arsip dan meningkatkan tertib administrasi kearsipan.

Dengan adanya SIPENA, pengelolaan arsip di lingkungan Biro Umum menjadi lebih efisien, modern, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

<https://sipena.biroumum.jatengprov.go.id>

**Gambar 2.27**  
**Sistem Peminjaman Arsip (SIPENA)**



e. Aplikasi Sapubarbar (Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-barang)

Sapubarbar dikembangkan sebagai solusi digital dalam pengelolaan usulan kebutuhan barang dari masing-masing unit kerja. Aplikasi ini berfungsi sebagai media penampungan usulan sekaligus mendukung proses **verifikasi, validasi, dan realisasi kebutuhan barang** secara sistematis dan terkontrol.

Manfaat utama Sapubarbar antara lain:

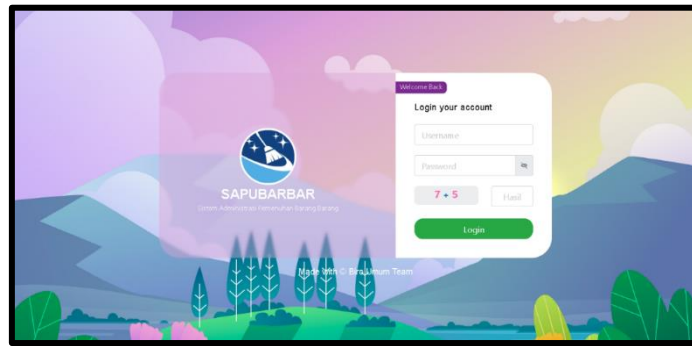
- Menyederhanakan proses pengajuan kebutuhan barang secara terpusat.
- Mendukung pengambilan keputusan melalui data usulan yang terdokumentasi dengan baik.
- Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemenuhan barang.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana.

Dengan Sapubarbar, proses administrasi pemenuhan barang di lingkungan Biro Umum menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan aset daerah.

<https://sapubarbar.biroumum.jatengprov.go.id>

**Gambar 2.28**

**Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang**



f. Aplikasi SIPANCAR (Sistem Informasi Pemantauan Pencairan)

SIPANCAR merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan pengendalian proses pencairan dokumen keuangan. Melalui digitalisasi sistem pemantauan, aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pengajuan dokumen pencairan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait.

Adapun manfaat penerapan SIPANCAR antara lain:

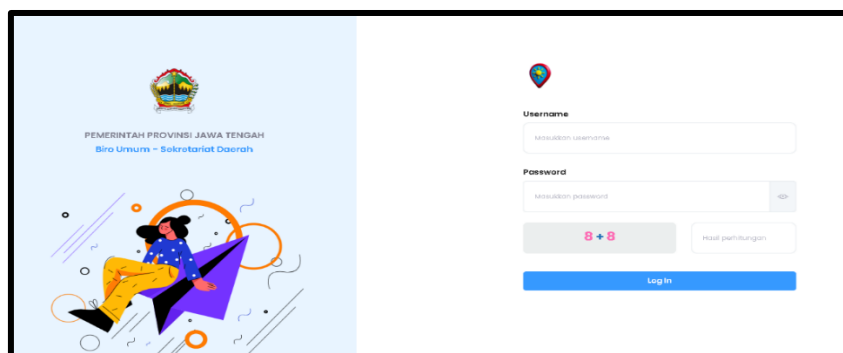
- Meningkatkan transparansi proses pengajuan dan pencairan dokumen keuangan.
- Mempermudah monitoring status dokumen pencairan.
- Mengurangi potensi keterlambatan dan miskomunikasi antar pihak.
- Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Implementasi SIPANCAR menjadi salah satu langkah konkret Biro Umum dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

<https://keuangan.eoffice.biroumum.jatengprov.go.id>

**Gambar 2.29**

**Sistem Informasi Pemantauan Pencairan**



## 6. Biro Kesejahteraan

### a. Silap Online Desa Dampingan

Sistem Pelaporan (Silap) Online Desa Dampingan merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Sistem ini digunakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan/melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya intervensi secara langsung penanggulangan kemiskinan di desa-desa dampingan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan tersebut dipergunakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi dan sebagai database terkait efektifitas intervensi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah

**Gambar 2.30**  
**Silap Online Desa**



### b. Silap Online CSR

Sistem Pelaporan (Silap) Online CSR merupakan sistem pelaporan berbasis sistem yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan dipergunakan oleh dunia usaha/perusahaan (Swasta/ BUMN/ BUMD/ Perorangan) untuk melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/ Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan serta pelaporan rencana kegiatan TJSLP/CSR pada tahun yang akan datang.

**Gambar 2.31**  
**Silap Online CSR**



- 7. Biro Perekonomian
  - a. Aplikasi DARI RANTAU

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk mempercepat pelaporan posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sehingga mempermudah pimpinan dalam memonitoring pelaksanaan posko terpadu di Jawa Tengah. Disamping itu, agar mempermudah pimpinan untuk melakukan Langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil apabila ada kejadian menonjol pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

**Gambar 2.32**  
**APLIKASI DARI RANTAU**



b. SIPETE (Sistem Pelaporan Terintegrasi)

Merupakan aplikasi yang dibuat oleh Biro Perekonomian bekerjasama dengan vendor (PT MSO), yang digunakan untuk membantu Pemegang Saham (Pemprov dan Pemkab/Kota) dalam memonitoring kinerja BPR BKK se Jawa Tengah. Untuk saat ini, aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan, dan akan dilakukan sosialisasi ke BPR BKK se Jawa Tengah dan Pemkab/Kota se Jawa Tengah. Sehingga diharapkan Pemegang Saham ataupun stakeholder dapat memantau perkembangan BPR BKK se Jawa Tengah secara *real time*.

**Gambar 2.33**  
**APLIKASI SIPETE**



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2025 merumuskan 2 (dua) target kinerja pada level Tujuan dan 5 (lima) target kinerja pada level sasaran. Seluruh indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam lima rumusan kinerja Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

#### Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 91%	Sangat Tinggi
2.	76 – 90,99%	Tinggi
3.	66 – 75,99%	Sedang
4.	51 - 65,99%;	Rendah
5.	≤ 50,99%	Sangat Rendah

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	39,93	107,63	37,1
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,78	104,20	90

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	95,47	106,08	90
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	84,15	105,19	80
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5	75,45	98,63	77
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	85,75	103,94	83,00
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2,71	90,33	3

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Dari 7 indikator kinerja utama yang diukur yaitu 1 indikator (14,3%) berada pada kategori “Tinggi” dan 6 indikator (85,7%) berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Rata-rata capaian seluruh indikator berada di atas 100%

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, program dan kegiatan Sekretariat Daerah telah dikelola secara efektif.

Capaian kinerja yang sebagian besar berada pada kategori Sangat Tinggi dan melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

a. Kualitas Perencanaan dan Kebijakan

Tingginya capaian Indeks Kematangan Kebijakan (107,63%) menunjukkan bahwa proses perencanaan dan perumusan kebijakan di Sekretariat Daerah telah semakin sistematis, berbasis data, dan terintegrasi. Dokumen perencanaan, kebijakan, serta program kerja telah disusun secara lebih matang dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

b. Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah

Keberhasilan seluruh indikator capaian program yang melebihi target mencerminkan kuatnya koordinasi lintas biro dan lintas OPD. Mekanisme rapat koordinasi, fasilitasi kebijakan, serta fungsi pengendalian yang dijalankan Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara konsisten.

c. Dukungan Pimpinan dan Komitmen Organisasi

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Daerah terhadap pencapaian target kinerja mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

d. Perbaikan Proses dan Pelayanan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (103,94%) menunjukkan bahwa perbaikan prosedur kerja, peningkatan responsivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan telah meningkatkan persepsi dan kepuasan pemangku kepentingan

Meskipun secara umum kinerja sangat baik, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sebagian indikator, khususnya Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Manajemen Risiko, yaitu:

a. Implementasi reformasi birokrasi yang belum merata

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi yang sedikit di bawah target menunjukkan bahwa masih terdapat unit kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar pada area perubahan, seperti penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas SDM aparatur.

b. Kematangan manajemen risiko yang beragam

Capaian Indeks Manajemen Risiko (90,33%) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum merata di seluruh unit kerja. Beberapa bagian masih berada pada tahap awal dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan rencana mitigasi risiko secara sistematis.

c. Keterbatasan Pemahaman Teknis

Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami konsep dan praktik manajemen risiko serta reformasi birokrasi, sehingga pelaksanaan di tingkat operasional belum optimal dan belum terdokumentasi dengan baik.

d. Dinamika Kebijakan

Tingginya dinamika kebijakan OPD seringkali menyebabkan fokus terhadap penguatan sistem internal, seperti pengendalian risiko dan pembenahan tata kelola, menjadi kurang maksimal.

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	39,93	107,63	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,78	104,20	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	95,47	106,08	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	84,15	105,19	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5	75,45	98,63	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	85,75	103,94	Sangat Tinggi	e-Controlling Kinerja
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2,71	90,33	Tinggi	e-Controlling Kinerja

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023-2025

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat, baik dari sisi realisasi kinerja maupun tingkat capaian

terhadap target. Secara umum, hampir seluruh indikator kinerja strategis mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian di atas 100 persen, yang menandakan bahwa target awal yang ditetapkan telah dilampaui. Hal ini menggambarkan bahwa kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program sudah berada pada level yang baik. Memasuki tahun 2024 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja menyesuaikan arah kebijakan Renstra 2024-2026, namun kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 masih tetap terjaga. Meskipun pada beberapa indikator terjadi fluktuasi realisasi, namun secara umum capaian masih berada dalam kategori baik hingga sangat baik, yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2025, sebagian besar indikator kembali memperlihatkan penguatan capaian, baik dari sisi peningkatan realisasi maupun stabilitas tingkat capaian. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai perbaikan sistem, sinergi kebijakan, serta penguatan manajemen kinerja mulai memberikan dampak yang nyata.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada jalur kinerja yang positif dan berkelanjutan. Konsistensi capaian di atas target mengindikasikan terdapat efektivitas perencanaan dan pengendalian kinerja, semakin kuatnya sinergi kebijakan, dan meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan perangkat daerah. Kondisi ini menjadi modal penting bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, khususnya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023-2025**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	<b>Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah</b>										
		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	85,84	107,30	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85,00	89,12	104,85	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	<b>Meningkatkan kualitas kebijakan daerah</b>										
		Indeks Kematangan Kebijakan	Na	Na	Na	36.10	39.93	110.61	37.1	39.93	107.63
	<b>Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>										

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	90,00	100	111,11	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	45	45	100,00	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	78	78,38	100,49	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	96	100	104,17	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	96	100	104,17	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	<b>Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>										

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89	93,7	105,28	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	85,37	100	117,14	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	85,37	90,24	105,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	87,76	91,83	104,64	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	90	90	100,00	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Ketercapaian Laba BUMD	75	98,17	130,89	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	90	92,53	102,81	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	82	84	102,44	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	<b>Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil</b>										
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	Na	Na	Na	90	93,72	104,13	90	93,78	104,20

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	Na	Na	Na	90	96,83	107,59	90	95,47	106,08
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	Na	Na	Na	80	86,3	107,88	80	84,15	105,19
	<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>										
		Nilai IKM Setda	78,5	86,15	109,75	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai Sakip Setda	73,97	79	106,80	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<b>Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah</b>										
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Na	Na	Na	76	74,33	97,80	76,5	75,45	98,63
	<b>Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah</b>										
		Indeks Manajemen Risiko	Na	Na	Na	3	2,89	96,33	3	2,71	90,33
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>										
		Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	78,5	88,5	112,74	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78,5	86,75	110,51	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Nilai IKM Biro ISDA	78,5	81,75	104,14	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Perekonomian	78,5	88,75	113,06	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Hukum	78,5	83,5	106,37	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	78,5	86,5	110,19	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Pemotdaker	78,5	83	105,73	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Biro Organisasi	78,5	82,75	105,41	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Nilai IKM Layanan Biro Umum	78,5	81,82	104,23	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	Na	Na	82	86,25	105,18	82,5	85,75	103,94
	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>										
		Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	100	100	100,00	Na	Na	Na	Na	Na	Na

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra 2024-2026

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan pada Tahun 2025 telah melampaui target 2026, yang mencerminkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi berada di jalur yang sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta kualitas pengendalian kinerja sudah berjalan optimal.

Realisasi indikator sasaran tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan target akhir 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan program sudah tepat sasaran dan pengendalian kinerja mampu memastikan hasil yang konsisten. Capaian ini memperlihatkan bahwa Setda tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berhasil mendorong output dan outcome program jangka menengah.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Setda pada Tahun 2025 dibandingkan target akhir Renstra 2024-2026 telah berada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Tahun Akhir 2026**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	<b>Meningkatkan kualitas kebijakan daerah</b>				
		Indeks Kematangan Kebijakan	39,93	37,1	107,63

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
2	<b>Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil</b>				
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	93,78	90	104,20
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	95,47	90	106,08
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	84,15	80	105,19
3	<b>Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah</b>				
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	75,45	77	97,99
4	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75	83	103,31
5	<b>Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah</b>				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Indeks Manajemen Risiko	2,71	3	90,33

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori sangat baik. Mayoritas indikator kinerja strategis telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah berjalan secara efektif dan terarah.

Capaian yang sangat tinggi pada indikator-indikator kinerja program perangkat daerah menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah mampu menjalankan perannya sebagai koordinator, fasilitator, dan pengendali kebijakan pembangunan daerah dengan optimal. Sinergi antar perangkat daerah, didukung oleh sistem perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja, telah mendorong terwujudnya keterpaduan program dan pencapaian hasil yang signifikan.

Di sisi lain, meskipun sebagian besar indikator telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dan konsistensi implementasi kebijakan di seluruh unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan budaya kinerja tetap menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan capaian yang telah diraih.

Secara keseluruhan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah		Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	39,93	107,63	Berhasil menjalankan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, dan pengendalian pembangunan daerah secara efektif. Mekanisme asistensi kebijakan, harmonisasi regulasi, dan pengendalian program OPD telah berjalan baik sehingga kualitas kinerja makro organisasi meningkat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan peran Sekretariat Daerah sebagai <i>policy integrator</i>;</li> <li>- Peningkatan kualitas telaahan staf dan asistensi kebijakan;</li> <li>- Monitoring pelaksanaan kebijakan strategis secara berkala</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,78	104,20	Lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat mampu menyusun dan melaksanakan program secara terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sistem evaluasi kinerja berbasis hasil juga mendorong OPD lebih fokus pada pencapaian outcome. Catatan nya yaitu pemberian bantuan hukum secara gratis kepada kelompok rentan belum optimal, pemetaan potensi kerjasama daerah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kerjasama yang selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum koordinasi perencanaan dan evaluasi lintas OPD;</li> <li>- Pemantauan capaian indikator secara triwulanan pada OPD ampunan;</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja OPD ampunan.</li> </ul>
			Persentase capaian kinerja program perangkat	%	90	95,47	106,08	lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa mampu menyusun dan melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum koordinasi perencanaan dan evaluasi lintas OPD;</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa					program secara terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sistem evaluasi kinerja berbasis hasil juga mendorong OPD lebih fokus pada pencapaian <i>outcome</i> . Masih terdapat catatan yaitu belum memiliki standar operasional dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan bidang ekonomi	- Penguatan peran biro sebagai penyusun kebijakan dan program
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	84,15	105,19	lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah melaksanakan koordinator, fasilitator, dan pengendali kebijakan pemerintahan secara efektif.	- Forum koordinasi perencanaan dan evaluasi lintas OPD; - Penguatan peran biro sebagai penyusun kebijakan dan program
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,5	75,45	98,63	Beberapa aspek RB (misalnya penguatan budaya kinerja dan manajemen SDM)	- Menyusun Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Sekretariat Daerah					memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak penuh	- Implementasi SPIP dan manajemen risiko.
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	85,75	103,94	Penerapan sistem pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pengendalian internal yang semakin matang membuat kualitas tata kelola meningkat signifikan namun masih terdapat sarpras yang perlu ditingkatkan	- Pendampingan Biro - biro dalam penyusunan laporan SKM - Pelaksanaan FKP setiap tahun - Review Standar Pelayanan
		Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2,71	90,33	Manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan penyusunan Renja, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Akibatnya, risiko yang telah diidentifikasi tidak selalu digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan kegiatan dan diperlukan monitoring secara berkala terhadap risiko yang telah ditetapkan	- Menyusun SK Tim Pengelolaan Risiko lingkup Sekretariat Daerah - Menyusun rencana tindak pengendalian risiko masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah. - Melaksanakan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rencana mitigasi risiko serta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									memastikan adanya tindak lanjut atas risiko-risiko prioritas yang belum tertangani

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya pada tahun 2025 sebanyak Rp.689.371.560.000,- (Enam ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 663.589.365.743,- (Enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau 96,26% terdapat efisiensi sebesar 3,74%. Sasaran pertama, meningkatnya sinergitas kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp.429.077.791.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.422.043.966.860,- atau 98,36% terdapat efisiensi sebesar 1,64%. Sasaran kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp. 260.129.219.000,- dengan realisasi sebesar Rp.241.382.018.383,- atau 92,79% terdapat efisiensi sebesar 7,21%. Sasaran ketiga, meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp.164.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.163.380.500,- atau 99,29% terdapat efisiensi sebesar 0,71%.

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									
		Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	39,93	107,63	429.077.791.000	422.043.966.860	98,36	1,64
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil									
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,78	104,20	419.428.792.000	412.931.514.106	98,45	1,55

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	95,47	106,08	5.996.341.000	5.712.565.238	95,27	4,73
		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	84,15	105,19	3.652.658.000	3.399.887.516	93,08	6,92
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5	75,45	98,63	260.293.769.000	241.545.398.883	92,80	7,20

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	85,75	103,94	260.129.219.000	241.382.018.383	92,79	7,21
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah									
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2,71	90,33	164.550.000	163.380.500	99,29	0,71
<b>Total</b>							<b>689.371.560.000</b>	<b>663.589.365.743</b>	<b>96,26</b>	<b>3,74</b>

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik. Hampir seluruh indikator kinerja strategis mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian kinerja telah berjalan secara efektif dan konsisten.

Indikator yang berkaitan dengan kinerja perangkat daerah, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas koordinasi dan kebijakan menunjukkan tren yang positif. Realisasi kinerja yang lebih tinggi dibandingkan target menandakan bahwa berbagai kebijakan dan program yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain itu, capaian sangat tinggi pada indikator-indikator pelayanan dan administrasi pemerintahan menggambarkan bahwa kualitas layanan internal dan eksternal semakin meningkat, seiring dengan penguatan sistem kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Pemanfaatan sistem informasi kinerja dan penguatan tata kelola internal turut meningkatkan akurasi pelaporan serta konsistensi pelaksanaan program. Dengan demikian, kinerja Sekretariat Daerah tidak hanya tercermin dari capaian angka, tetapi juga dari meningkatnya kualitas proses dan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

**Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  
Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah						
	Indeks Kematangan Kebijakan	107,63				Menunjang
Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil						
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	104,2				Menunjang
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
				Tingkat efektivitas kerjasama daerah	105,26	Menunjang
				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	105,26	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Kerjasama Daerah			
				Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
				Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
				Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	105,26	Menunjang
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	100	Menunjang
			Pelaksanaan Otonomi Daerah			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	100	Menunjang
				Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	105,26	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Menunjang
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	100	Menunjang
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kot a yang dikaji	103	Menunjang
				Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	102	Menunjang
				Persentase kabupaten/kot a peduli HAM	100	Menunjang
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	100	Menunjang
				Jumlah dokumen kajian produk hukum	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kot a	100	Menunjang
			Fasilitasi Bantuan Hukum			
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100	Menunjang
			PROGRAM KESEJAHTERA AN RAKYAT			
				Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	100	Menunjang
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			
				Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan Perpustakaan		
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	100	Menunjang
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
				Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	106,08				
			PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N			
				Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	112,95	Menunjang
				Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	112,66	Menunjang
				Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	106,2	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N			
				Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	100	Menunjang
				Persentase nilai kemandirian BLUD	100	Menunjang
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	100	Menunjang
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	100	Menunjang
				Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	100	Menunjang
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	100	Menunjang
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	100	Menunjang
				Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	100	Menunjang
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
				Persentase fasilitasi	101,53	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pengadaan barang/jasa		
				Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	105,33	Menunjang
				Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	101,49	Menunjang
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	100	Menunjang
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
				Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100	Menunjang
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Barang dan Jasa			
				Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100	Menunjang
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	105,19				Menunjang
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
				Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	100	Menunjang
				Persentase kabupaten/kot a yang meningkat skor kematangan organisasinya	100	Menunjang
				Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasikan hasil analisis jabatan secara efektif	106,67	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	100	Menunjang
				Persentase kabupaten/kot a dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	100	Menunjang
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	137,93	Menunjang
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaa n	100	Menunjang
				Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimpleme ntasikan standar pelayanan	100	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	100	Menunjang
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kot a	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
				Capaian Pelaksanaan APBD	100,48	Menunjang
				Capaian Pelaksanaan APBN	100	Menunjang
				Persentase realisasi bantuan keuangan	115,47	Menunjang
				Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	100	Menunjang
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	Menunjang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	100	Menunjang
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pembangunan Daerah		
				Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	101,08	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100	Menunjang
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah						
	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	98,63				Menunjang
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,94				Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	Menunjang
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	100	Menunjang
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	100	Menunjang
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
				Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	100	Menunjang
			Fasilitasi Keprotokolan			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah laporan fasilitasi keprotokolalan yang disusun	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
				Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	Menunjang

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	100	Menunjang
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	Menunjang
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
			Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah			

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan, Saasaran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Program/Ke giatan</b>	<b>Indikator Program/Ke giatan</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Menunjang /Tidak Menunjang</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase layanan fasilitasi kerumahtangg an sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100	Menunjang
Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah						
	Indeks Manajemen Risiko	90,33				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	Menunjang

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025, didukung APBD sebesar Rp 689.371.560.000,- (Enam ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung APBD sebesar Rp. 260.293.769.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.545.398.883,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 92,80%.
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah didukung APBD sebesar Rp.3.246.217.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.919.717.080,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 89,94%.
3. Program Kesejahteraan Rakyat didukung APBD sebesar Rp.413.371.924.000,- terealisasi sebesar Rp.407.230.574.806,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,51%
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum didukung APBD sebesar Rp.2.810.651.000,- terealisasi sebesar Rp.2.781.222.220,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,95%
5. Program Perekonomian dan Pembangunan didukung APBD sebesar Rp. 4.235.260.000,- terealisasi sebesar Rp.4.006.592.276 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 94,60%
6. Program Penataan Organisasi didukung APBD sebesar Rp. 1.936.969.000,- terealisasi sebesar Rp.1.686.779.127,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 87,08%
7. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa didukung APBD sebesar Rp. 1.761.081.000,- terealisasi sebesar Rp.1.705.972.962,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 96,87%
8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan didukung APBD sebesar Rp 1.715.689.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.713.108.389,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99,85%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program dan kegiatan, sebagaimana dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>3.246.217.000</b>	<b>2.919.717.080</b>	<b>89,94</b>
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.507.813.000	1.197.188.314	79,40
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	698.403.000	696.838.766	99,78
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.040.001.000	1.025.690.000	98,62
<b>2</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>413.371.924.000</b>	<b>407.230.574.806</b>	<b>98,51</b>
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	365.719.000	364.712.807	99,72
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	457.259.000	457.140.423	99,97
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	412.548.946.000	406.408.721.576	98,51
<b>3</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>2.810.651.000</b>	<b>2.781.222.220</b>	<b>98,95</b>
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.330.511.000	1.327.296.120	99,76
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.480.140.000	1.453.926.100	98,23
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>4.235.260.000</b>	<b>4.006.592.276</b>	<b>94,60</b>
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	966.824.000	962.683.995	99,57
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.196.536.000	1.096.238.386	91,62

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	2.071.900.000	1.947.669.895	94,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>1.761.081.000</b>	<b>1.705.972.962</b>	<b>96,87</b>
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	473.848.000	465.897.599	98,32
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	801.986.000	775.576.664	96,71
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	485.247.000	464.498.699	95,72
<b>6</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.715.689.000</b>	<b>1.713.108.389</b>	<b>99,85</b>
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.194.776.000	1.193.670.389	99,91
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	520.913.000	519.438.000	99,72
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>1.936.969.000</b>	<b>1.686.779.127</b>	<b>87,08</b>
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	660.587.000	655.104.499	99,17
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.276.382.000	1.031.674.628	80,83
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>260.293.769.000</b>	<b>241.545.398.883</b>	<b>92,80</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.550.000	163.380.500	99,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.337.695.000	14.954.222.897	91,53

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	426.983.000	416.017.600	97,43
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	23.827.484.000	23.646.365.644	99,24
	Fasilitasi Keprotokolan	3.089.070.000	3.037.070.000	98,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.862.359.000	88.489.420.597	88,61
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.089.757.000	1.035.817.647	95,05
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	17.415.000	87,08
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.456.734.000	36.346.260.083	97,04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.546.608.000	26.804.747.171	93,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.851.144.000	13.828.240.099	93,11
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.880.385.000	25.074.326.634	93,28
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.741.000.000	7.732.115.011	99,89
	<b>TOTAL</b>	<b>689.371.560.000</b>	<b>663.589.365.743</b>	<b>96,26</b>

### 3.3 INOVASI

#### 1. Biro Hukum

Biro Hukum pada tahun 2025 melakukan pengembangan dan inovasi pada Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Jawa Tengah berupa :

- a. Penambahan *tools access website* untuk Penyandang Disabilitas

**Gambar 3.1**  
**JDIH**



- b. Penambahan **Menu Pencarian** Kategori/Jenis Produk Hukum



- c. Penambahan Aplikasi yang terintegrasi dalam website JDIH Jateng yang antara lain Ulas Pranata, Pradesih Jateng dan Urun Rembug.
- 1) **Ulas Pranata** memiliki arti mengkaji peraturan, dalam hal ini analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan tujuan untuk menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku baik pada segi normatif sekaligus efektivitas implementasi. Ulas Pranata hadir sebagai media bagi masyarakat dan stakeholder untuk berkontribusi dalam Analisis dan Evaluasi Hukum khususnya Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur).
  - 2) **Pradesih Jateng** merupakan kepanjangan dari Pelaporan Dokumentasi Hukum Desa Terintegrasi JDIH Jawa Tengah. Pradesih merupakan aplikasi untuk melaporkan pengelolaan dokumentasi regulasi Desa di Jawa Tengah. Pelaporan ini dilakukan untuk mendorong pendokumentasian dan penginformasian hukum Desa di Jawa Tengah agar terintegrasi dalam wadah Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional.
  - 3) **Urun Rembug** merupakan platform untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses pembentukan. Platform ini memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan khususnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.



## 2. Biro Perekonomian

Pada tahun 2025, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BUMD melakukan replikasi simanis mart (kios pengendali inflasi) di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Outcome kegiatan tersebut yaitu memotong rantai pasok distribusi dari produsen ke konsumen. Manfaat dari kegiatan ini yaitu inflasi terjaga dalam rentang kendali  $2,5 \pm 1$ . Dampak kegiatan tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan daya beli di masyarakat. Permasalahan adanya fluktuasi harga komoditas pangan strategis penyebab inflasi. Upaya yang dilakukan adalah penguatan sinergi dan koordinasi antar stakeholders terkait. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD yaitu Meningkatkan kapasitas TPID.

**Gambar 3.2**  
**Aplikasi SIMANIS MART**



## 3. Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk pembangunan infrastruktur publik, Biro Administrasi

Pembangunan Daerah sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan Daerah mengembangkan sistem informasi dalam *Government Resources Management System* (GRMS) Provinsi Jawa Tengah yaitu e-Controlling DAK.

e-Controlling DAK merupakan salah satu instrumen monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK fisik di Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi yang disajikan dalam e-Controlling DAK yaitu mulai dari proses perencanaan, mekanisme pelaksanaan, progres realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

Disamping itu, DAK fisik merupakan dana transfer pusat yang mempunyai karakteristik khusus dalam hal penyalurannya. Penyaluran DAK fisik dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, dimana setiap tahapannya diperlukan pemenuhan dokumen persyaratan salur oleh masing-masing OPD pengampu DAK. Sebagai mitigasi risiko terjadinya gagal salur yang disebabkan oleh keterlambatan pemenuhan dokumen pendukung persyaratan salur maka e-Controlling DAK mengakomodir fitur progres tahapan DAK sebagai bentuk pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan salur dalam setiap tahapannya.

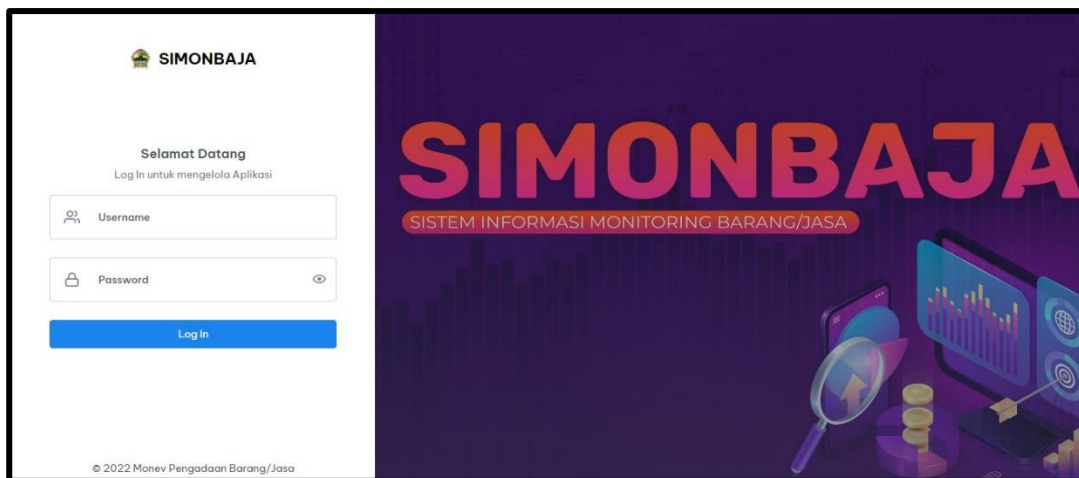
#### 4. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengembangan Fitur Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) merupakan platform digital bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam monitoring target dan realisasi proses pengadaan barang/jasa. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) mengintegrasikan data perencanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), data pemilihan penyedia barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta data e-Purchasing dengan aplikasi E-Katalog dan Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng). Selain itu Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) menampilkan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan alokasi paket pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diperoleh dari hasil input ekontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tahun 2025 Sistem

Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) mengembangkan beberapa fitur untuk meningkatkan layanan kepada Internal Organisasi dan SKPD yaitu:

- a. Penyediaan fitur tenaga ahli yang digunakan oleh Pokja Pemilihan sebagai data dukung dalam proses verifikasi dan klarifikasi data tenaga ahli milik perusahaan;
- b. Penyediaan fitur peralatan yang digunakan oleh Pokja Pemilihan sebagai data dukung dalam proses verifikasi dan klarifikasi data peralatan milik Perusahaan;
- c. Penambahan fitur kertas kerja pengadaan barang dan jasa sebagai alat bantu SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

**Gambar 3.3**  
**SIMONBAJA**



## 5. Biro Organisasi

### a. SIBRO ( Sistem Keorganisasian Terpadu)

SIBRO merupakan pengembangan dari sistem informasi METAL (Monitoring dan Evaluasi Tatalaksana). SIBRO digunakan sebagai database organisasi untuk mempermudah pencarian data di Biro Organisasi, sarana fasilitasi dan monev Biro Organisasi ke OPD dan Pemkab/kota.

**Gambar 3.4**  
**Aplikasi SIBRO**



## 6. Biro Umum

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 membuat Inovasi Sipena, Sapubarbar dan Sipancar adalah aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Arsip, Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang dan Sistem Informasi Pemantauan Pencairan yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah dimana aplikasi ini digunakan untuk manajemen arsip, manajemen barang dan system pencairan, yang dapat diakses melalui web/ link.

### a. Aplikasi **SIPENA (Sistem Informasi Peminjaman Arsip)**

SIPENA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses peminjaman arsip secara terintegrasi dan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan, persetujuan, hingga pengembalian arsip dapat dilakukan secara online dan terdokumentasi dengan baik.

Implementasi SIPENA memberikan manfaat antara lain:

- Mempercepat proses peminjaman arsip tanpa harus melalui proses manual.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.
- Menyediakan rekam jejak peminjaman arsip yang dapat dipantau secara real time.

- Mengurangi risiko kehilangan arsip dan meningkatkan tertib administrasi kearsipan.

Dengan adanya SIPENA, pengelolaan arsip di lingkungan Biro Umum menjadi lebih efisien, modern, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

<https://sipena.biroumum.jatengprov.go.id>

b. Aplikasi **Sapubarbar (Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang)**

Sapubarbar dikembangkan sebagai solusi digital dalam pengelolaan usulan kebutuhan barang dari masing-masing unit kerja. Aplikasi ini berfungsi sebagai media penampungan usulan sekaligus mendukung proses verifikasi, validasi, dan realisasi kebutuhan barang secara sistematis dan terkontrol.

Manfaat utama Sapubarbar antara lain:

- Menyederhanakan proses pengajuan kebutuhan barang secara terpusat.
- Mendukung pengambilan keputusan melalui data usulan yang terdokumentasi dengan baik.
- Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemenuhan barang.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana.

Dengan Sapubarbar, proses administrasi pemenuhan barang di lingkungan Biro Umum menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan aset daerah.

<https://sapubarbar.biroumum.jatengprov.go.id>

c. Aplikasi **SIPANCAR (Sistem Informasi Pemantauan Pencairan)**

SIPANCAR merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan pengendalian proses pencairan dokumen keuangan. Melalui digitalisasi sistem pemantauan, aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pengajuan dokumen pencairan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait.

Adapun manfaat penerapan SIPANCAR antara lain:

- Meningkatkan transparansi proses pengajuan dan pencairan dokumen keuangan.
- Mempermudah monitoring status dokumen pencairan.
- Mengurangi potensi keterlambatan dan miskomunikasi antar pihak.
- Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Implementasi SIPANCAR menjadi salah satu langkah konkret Biro Umum dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

<https://keuangan.eoffice.biroumum.jatengprov.go.id>

Untuk peningkatan pelayanan umum akan dilakukan perbaikan PPID Setda Provinsi Jawa Tengah dengan mengunggah Dokumen Perencanaan dan Hasil-hasil Pelaksanaan Kegiatan serta dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dapat diakses melalui web <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>

Selama tahun 2025, pengelolaan *website* PPID telah mengalami beberapa perubahan, meliputi perubahan pada halaman konten informasi berkala, halaman informasi setiap saat, penambahan halaman statistik jumlah permohonan informasi, migrasi tampilan/*redesign website* PPID, penambahan halaman aduan/formulir *online* layanan disabilitas, dan penambahan halaman statistik aduan masyarakat.

Adapun perubahan pada halaman konten informasi berkala yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2025 dan halaman konten informasi setiap saat yang dilakukan pada bulan Maret-April 2025 adalah merubah tata letak halaman konten informasi berkala agar lebih *user friendly* serta memudahkan *user* dalam memahami dan mengetahui informasi yang disampaikan.

Sedangkan penambahan halaman yang memuat statistik jumlah permohonan informasi pada bulan Mei-Juni 2025 dan penambahan halaman statistik aduan masyarakat yang dilakukan pada periode November-Desember 2025 berfungsi untuk menampilkan hasil *monitoring* jumlah permohonan informasi dari masyarakat yang diterima dan ditolak,

serta jumlah laporan aduan masyarakat yang dikemas dalam bentuk statistik, sehingga hal ini dapat dijadikan bahan analisis pengembangan *website* PPID ke depannya.

*Website* PPID sendiri pada tahun 2025 juga mengalami *redesign* tampilan mulai dari menu *navigation bar* (navbar), logo, *template* konten, dan bagian *footer website* sehingga tampilannya menjadi lebih *fresh* dan kekinian. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam mengunjungi, mencari informasi, dan mengajukan aduan pada *website* PPID. Selain itu, penambahan halaman baru, yakni formulir *online* layanan disabilitas yang memanfaatkan *webcam* dan *voice recorder* secara *realtime* diharapkan mampu menunjang masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan menggunakan *website* PPID.

### 3.4 PENGHARGAAN

#### 1. Biro Hukum

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam UrusanUnsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 telah memperoleh beberapa penghargaan, antara lain;

- a. Peringkat II “Eka Acapalati” sebagai Anggota JDIH Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan nilai 96.
- b. Juara I Kategori Provinsi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (AA/Istimewa).

**Gambar 3.5**  
**Penghargaan Juara I Kategori Provinsi penilaian**  
**Indeks Reformasi Hukum (IRH)**





c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu Pemerintah Daerah Pelapor Aksi HAM Tahun 2025. Hasil penilaian menunjukkan Nilai 100 (**Sempurna**) untuk 6 Aksi HAM Daerah

**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta 12940 Telp (021) 2521344, 2528808, Fax (021) 2522915, 2528809  
Laman: kementerian.go.id

Nomor: 1064-10A.01.01.01-107  
Sifat: Segera  
Lampiran: 2 (dua) berkas  
Hal: Capaian Aksi HAM Kementerian/Lembaga Periode Pelaporan B-12 Tahun 2025

Yth. Kepala Daerah Provinsi (daftar terlampir)  
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Panitia Nasional RAN-HAM telah melakukan verifikasi terhadap laporan Aksi HAM yang diapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk periode pelaporan B12 Tahun 2025 melalui aplikasi sapaah.kemham.go.id/loingsapaah.

Bersama surat ini, terlampir hasil capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah periode pelaporan B12 Tahun 2025. Panitia nasional RAN-HAM mengapresiasi sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan dan mencapai target Aksi HAM yang maksimal, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otoritas pelaksanaan aksi HAM di tahun selanjutnya dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi HAM Nasional periode 2026-2030 akan meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas.

Demikian surat capaian ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

*M. Marwan Marwan*  
Menteri Koordinator Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

Tembusan:  
1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Integrasi, dan Pemasyarakatan RI;  
2. Menteri Hak Asasi Manusia RI;  
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS);  
4. Kepala Staf Kepresidenan RI;  
5. Menteri Hukum RI;  
6. Menteri Dalam Negeri;  
7. Menteri Sosial RI; dan  
8. Menteri Luar Negeri RI.

**PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2025**  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3/10

KELOMPOK SASARAN	AKSI	PERIODE			NILAI CAPAIAN TAHUN 2025
		B04	B08	B12	
Penemuan	1	100	100	100	100
Penemuan	2	100	100	100	100
Penyandang Disabilitas	3	100	100	100	100
Penyandang Disabilitas	4	100	100	100	100
Penyandang Disabilitas	5	100	100	100	100
Penyandang Disabilitas	6	100	100	100	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>		100	100	100	<b>100</b>

**KETERANGAN AKSI**

AKSI 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi penemuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
AKSI 2	Melakukan revisi, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap penemuan di tingkat nasional dan daerah.
AKSI 3	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
AKSI 4	Menyediakan layanan pendidikan inklusi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
AKSI 5	Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
AKSI 6	Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

## 2. Biro Perekonomian

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan, diantaranya:

a. TPID Award dengan kategori Provinsi dengan kinerja TPID terbaik Tahun 2025 se-Jawa – Bali yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.

**Gambar 3.6**  
**TPID Award Provinsi dengan kinerja TPID terbaik**



b. Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan kepada Provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin, mengembangkan, serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil memenangkan Penghargaan Adinata Syariah 2025 dengan kategori:

- Juara 1 Kategori Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat)
- Juara 3 Kategori Keuangan Mikro Syariah

**Gambar 3.7**  
**Anugerah Adinata Syariah**



Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berhasil mengkoordinasikan instansi terkait baik internal maupun eksternal dalam rangka perolehan penghargaan tersebut. Biro

Perekonomian selaku Sekretaris TPID dan Sekretaris KDEKS akan senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bersama-sama dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi

### 3. Biro Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, pada Tahun 2025 Biro Organisasi mendapatkan beberapa jenis penghargaan, khususnya dari pemerintah pusat. Meskipun bukan secara mandiri, penghargaan tersebut tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Biro Organisasi, baik dalam melakukan fungsi pembinaan, fasilitasi, sehingga mengungkit dan mendorong perangkat daerah lainnya dalam memperoleh penghargaan tersebut. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. FINALIS TOP INOVASI KIPP TAHUN 2025 KELOMPOK UMUM Dari Kemenpan RB atas Inovasi HETERO SPACE (HOUSE OF ENTREPRENEURS, TECHNOLOGY-DRIVEN ECOSYSTEM, RESOURCE OPTIMIZATION, SUPPORTIVE PROGRAMS, ACCESSIBLE NETWORK, COLLABORATIVE ENVIRONMENT)

**Gambar 3.8**  
**FINALIS TOP INOVASI KIPP TAHUN 2025 KELOMPOK UMUM**



#### 4. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Biro Infrastruktur dan SDA mendapatkan Peringkat 3 pada Kategori Biro lingkup Sekretariat Daerah dengan Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terbaik pada tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada Ibu Kepala Biro Infrastruktur dan SDA dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Business Matching Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Rabu - Kamis, 3 - 4 Desember 2025 di Semarang. Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam mewujudkan upaya Good Governance lingkup Sekretariat Daerah.

**Gambar 3.9**  
**Penganugerahan ITKP Tahun 2025**



#### 5. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2025 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Prov. Jateng memperoleh Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah sebagai Peringkat 1 Kategori Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terbaik. Penghargaan ITKP award Jawa Tengah 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 3.10**  
**Penyerahan Penghargaan Piagam Penghargaan**



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 5 (lima) indikator. Pada indikator tujuan yang tercapai dalam kategori “sangat tinggi” yaitu Indeks Kematangan Kebijakan, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah tercapai dalam kategori “tinggi”.
2. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; peningkatan upaya pengendalian kinerja perangkat daerah oleh Biro lingkup Setda sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah; dan adanya perbaikan layanan umum Sekretariat Daerah.
3. Faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain: adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya, pelaksanaan koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya kolaborasi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
4. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebanyak Rp.689.371.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp 663.589.365.743,- atau 96.26% terdapat efisiensi sebesar 3,74%.
5. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mampu mewujudkan penyelenggaraan urusan konkruen; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum secara prima dan meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Daerah.

## 4.2. REKOMENDASI

Dalam rangka optimalisasi kinerja Biro Lingkup Sekretariat Daerah, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada kelompok rentan di Jawa Tengah yang sedang menghadapi permasalahan hukum.
2. Melaksanakan pemetaan potensi kerjasama daerah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kerjasama yang selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
3. Penyusunan standar operasional dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan bidang ekonomi maupun monitoring pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dari rekomendasi kebijakan yang diberikan.
4. Peningkatan kualitas sarana prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Melaksanakan agenda dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Provinsi Jawa Tengah dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Sekretariat Daerah.
6. Melaksanakan monitoring secara berkala triwulanan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang telah diidentifikasi pada masing-masing biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpon. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNO, S.E., M.M.

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

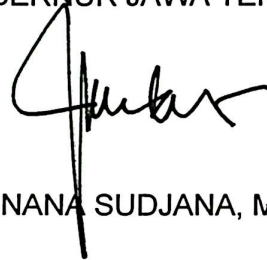
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kematangan Kebijakan	37.1 (Angka) ✓
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,5 (Angka) ✓

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 254.452.647.000	APBD ✓
2. Program Penataan Organisasi	Rp. 1.780.528.000	APBD ✓
3. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp. 3.478.000.000	APBD ✓
4. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 400.058.148.000	APBD ✓
5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.918.000.000	APBD ✓
6. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 3.162.448.000	APBD ✓

Program	Anggaran	Keterangan
7. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp. 2.598.489.000	APBD
8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 2.040.000.000	APBD

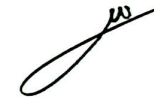
Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpon. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Semarang, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
SUMARNO, S.E., MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1001

  
Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001


Jabatan	Perif	Tgl
Asisten/Adm	SE	
Ka. Biro		06/1/25
Ka. Bag		14/1/25


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**




No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat Biro Lingkup Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.	82,5 (Angka)
3.	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Lingkup Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.	3 (Angka)

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Semarang, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
SUMARNO, S.E. MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1

  
Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Ass. III/Adm		
Ka. Biro		6/7
Ka. Bng		12/11



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpn. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si

Jabatan : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Semarang, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
ASISTEN EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN

  
SUMARNO, S.E, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

  
Dr.A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651204 199203 1 012




Jabatan	Paraf	Tgl
Ka.UT/Adm	SE	
Ka.Biro		14/1
Ka.Bag		14/1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil.	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ.	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ.	82,5 (angka)
3.	Meningkatnya manajemen risiko Perangkat Daerah.	Indeks Manajemen Risiko Biro Lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ.	3 (angka)

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Ass. III/Adm		
Ka. Biro		14.7.
Ka. Bag		14.11.

Semarang, Januari 2025

Pihak Pertama,  
ASISTEN EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN

  
Dr. A. P. Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M. Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651204 199203 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpn. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET, AK  
Jabatan : Plt. Asisten Administrasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,  
Plt. ASISTEN ADMINISTRASI

  
SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

  
SLAMET, AK  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
As. III/Aadm	sc	
Ka. Biro		16/1
Ka. Bag		

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN ADMINISTRASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Lingkup Administrasi, Organisasi, dan Pembangunan Daerah.	82,5 (Angka)
3.	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Lingkup Administrasi, Organisasi, dan Pembangunan Daerah.	3 (Angka)

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

*(Signature)*  
**SUMARNO, S.E., MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
**Pt. ASISTEN ADMINISTRASI**

*(Signature)*  
**SLAMET, AK**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Ass. III/Adm	<i>(Signature)</i>	
Ka. Biro	<i>(Signature)</i>	<i>(Date)</i>
Ka. Bag	<i>(Signature)</i>	<i>(Date)</i>



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASIP KHASANI, S.IP, MM  
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 1 Oktober 2025  
Pihak Pertama,  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN  
KERJASAMA

  
YASIP KHASANI, S.IP, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741219 199703 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

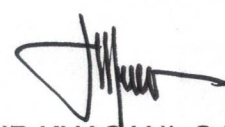
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1) Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Umum	2) Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3) Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95 %
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	4) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100 %
		5) Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	82,5
		6) Indeks Manajemen Risiko Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	3

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.246.217.000	APBD
2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	711.956.000	APBD

Semarang, 1 Oktober 2025  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700514 199202 1 001

  
YASIP KHASANI, S.IP, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19741219 199703 1 005



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHSEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 8311266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si  
Jabatan : Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 1 OKTOBER 2025


Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

  
GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19690214 199703 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya efektivitas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	83%
		Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang Non pelayanan dasar	84%
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	60%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesra	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Kesejahteraan Rakyat	82,5%
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Kesejahteraan Rakyat	3

**Program**

1. Program Kesejahteraan Rakyat
2. Program Administrasi Umum

**Anggaran**

Rp. 413.371.924.000,-  
Rp. 385.655.000,-

**Keterangan**


APBD  
APBD

Semarang,

2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Pit. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001



GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si  
Pembina TK I

NIP. 19690214 199703 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDIN, SH, MH.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Pihak Pertama  
Kepala Biro Hukum

Haerudin, SH, MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197007291996031001

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.810.651.000,-	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 424.518.000,-	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan 100%

Semarang, 1 Oktober 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Kepala Biro Hukum

Haerudin, SH, MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197112071995031003



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULY EMMYLIA, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



JULY EMMYLIA, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720713 199703 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	<b>Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil</b>		
	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84 %
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79 %
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86 %
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82 %
		Persentase nilai kemandirian BLUD	56 %
2	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.5
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100%
3	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah</b>	Indeks Manajemen Risiko Biro Perekonomian	3

Program

1. Perekonomian dan Pembangunan
2. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Anggaran

Rp. 3.162.448.000,-  
Rp. 307.952.000,-

Keterangan

APBD  
APBD

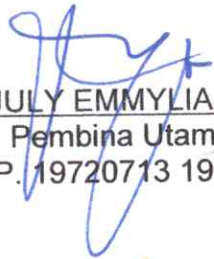
Semarang, 10 Januari 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

**SETDA**

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

  
JULY EMMYLIA, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720713 199703 2 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50243  
Telepon 024-8311173 (20 saluran), Faksimile 024-8311266  
Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI LESTARI, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM


Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

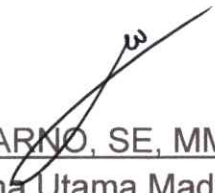
  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Semarang, 2025  
Pihak Pertama,  
KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR  
DAN SUMBER DAYA ALAM

  
ENI LESTARI, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197212011998032011


- Program**
1. Program Perekonomian dan Pembangunan
  2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

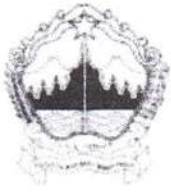
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
Rp. 2.071.900.000,-	APBD dan DBHCHT
Rp. 441.074.000,-	APBD

Semarang, 2025  
KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN  
SUMBER DAYA ALAM

  
ENI LESTARI, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197212011998032011



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom.  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, S.E., M.M.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680828 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
 BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	91%
	Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	82%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	82%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	82,5
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	3

**Program**

	Anggaran	Keterangan
1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.761.081.000,-	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 135.353.000,-	APBD

Semarang, 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PIT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN  
 BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19700514 199202 1 001

RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom., M.Kom.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680828 199703 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243  
Telepon 024-8311173 (20 saluran) Faksimile 024-8311266  
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Post el [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM,MT

Jabatan : PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE., MM.

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,  
PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

  
SUMARNO, SE., MM.

Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

  
TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM,MT

Pembina Tingkat I  
NIP 197301061999031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil</b>		
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan APBD	98,8%
		Capaian pelaksanaan APBN	95,5%
		Persentase realisasi bantuan keuangan	85%
		Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan Daerah	86%
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan Daerah yang direalisasi	100%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	82.5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah Biro Pembangunan Daerah	100%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah</b>	Indeks Manajemen Risiko Biro Administrasi Pembangunan Daerah	3
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.715.689.000,-	APBD
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 558.700.000,-	APBD

Semarang,

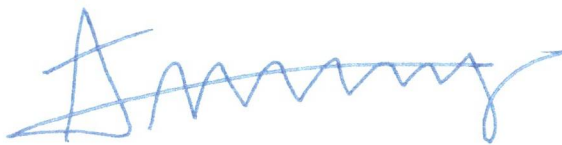
2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
SUMARNO, SE., MM.

Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

Pihak Pertama,  
PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH



TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM,MT

Pembina Tingkat I  
NIP 197301061999031010



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM.

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO ORGANISASI

HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800919 199912 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Ass. III/Adm		
Ka. Biro		15/10/25
Ka. Bag		15/10/25

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BIRO ORGANISASI**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	70% 88.57% 90%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPPRB)nya A. Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	36.59% 48.57% 69.05%
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	92% 91.01%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100% 82.5
		Indeks Manajemen Risiko	3

**Program**

- 1. Program Penataan Organisasi
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**Anggaran**

Rp. 1.936.969.000,-  
Rp. 554.386.000,-




**Keterangan**

APBD  
APBD

Semarang, 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
SUMARMO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Ases. III/Adm		15/10
Ka. Biro		15/10
Ka. Bag		15/10

KEPALA BIRO ORGANISASI

  
HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800919 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 8311174 ( 20 saluran )  
Faksimile 8311266 Laman <http://www.jawatengah.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAKSONO DEWANTO, S.E, M.M.  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, S.E, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 25 September 2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, S.E, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BIRO UMUM

  
LAKSONO DEWANTO, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198200621 200812 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

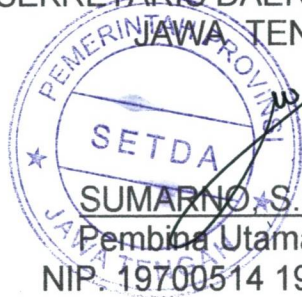
No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Program</b>			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Biro Umum	82,5%
5	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Capaian Indeks Manajemen Risiko	3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 256.919.743.000,-	Sumber Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025

Semarang, 25 September 2025

Pit. KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

LAKSONO DEWANTO, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198200621 200812 1 001